

**ANALISIS POLA PANGAN HARAPAN
KONSUMSI PANGAN PENDUDUK
KOTA BOGOR**



Disusun Oleh
YAYAT HERYATNO, SP, MPS

**DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA - IPB UNIVERSITY
TAHUN 2025**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pangan adalah kebutuhan dasar hayati manusia yang paling utama, karena itu pemenuhan kebutuhan pangan merupakan bagian dari hak azasi individu. Selain itu juga pangan memegang peranan yang paling penting penting dalam rangka pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas, sehat dan produktif.

Program peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan di Indonesia. Pencapaian ketahanan pangan nasional yang diawali dengan perwujudan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, terdapat suatu jaminan bagi seluruh penduduk untuk memperoleh pangan dan gizi yang cukup untuk menghasilkan generasi yang sehat dan cerdas.

Mengingat pentingnya hal tersebut, setiap negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai fondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, perkembangan konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah merupakan salah satu indikator kinerja bidang ketahanan pangan, sekaligus mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bidang ketahanan pangan oleh pemerintah daerah. Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam bentuk analisis situasi konsumsi pangan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang kuantitas dan kualitas konsumsi pangan penduduk.

Dalam rangka mewujudkan upaya tersebut di atas, pada tahun anggaran 2024, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kota Bogor secara khusus telah melaksanakan kegiatan Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kota Bogor. Informasi yang

diperoleh diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan ketahanan pangan, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan wilayah menuju pencapaian kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan.

Secara umum tujuan kajian ini adalah menganalisis Pola Pangan Harapan konsumsi pangan penduduk Kota Bogor berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional. Adapun secara lebih khusus kajian ini bertujuan untuk: 1). Menganalisis situasi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kota Bogor berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH); dan 2). Menganalisis estimasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor.

Data pokok yang digunakan adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik, yaitu data konsumsi pangan penduduk hasil Susenas serta data jumlah penduduk Kota Bogor tahun 2023. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Program Aplikasi Harmonisasi Analisis Pola Pangan Harapan Berdasarkan Data Susenas yang dikembangkan oleh Tim Harmonisasi PPH Nasional atas kerjasama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Secara umum berdasarkan volumenya konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor Tahun 2023 masih belum optimal. Berdasarkan hasil analisis situasi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kota Bogor menurut data Susenas tahun 2023 terlihat bahwa sebagian besar kelompok pangan kecuali pada kelompok kecuali pada kelompok padi-padian, pangan hewani dan minyak & lemak.

Total asupan energi konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor hanya mencapai 2,068 kkal/kapita/hari (98.5 %AKE). Adapun total asupan protein konsumsi pangan penduduk di wilayah Kota Bogor pada telah

mencapai 63.4 gram/kapita/hari (111.2 %AKP). Hal ini berarti bahwa secara kuantitas konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kota Bogor masih belum optimal. Demikian pula secara kualitas, konsumsi pangan penduduk Kota Bogor masih belum optimal. Pada tahun 2023 skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan penduduk Kota Bogor baru mencapai sekitar 89.8 yang berarti masih jauh dari skor PPH ideal nasional sebesar 100.

Pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor belum terealisasi seusuai harapan. Kelompok pangan yang pemenuhan kebutuhan konsumsinya melebihi idealnya berdasarkan Pola Pangan Harapan hanyalah padi-padian (120.0 kg/kapita), pangan hewani (49.2 kg/kapita), dan minyak & lemak (12.1 kg/kapita) per tahun. Sementara kelompok umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, sayur dan buah, dan lain-lain belum memenuhi estimasi idealnya. Untuk mencapai estimasi ideal kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor pada Tahun 2023 masih diperlukan tambahan pangan kelompok umbi-umbian (29.1 kg/kapita), buah/biji berminyak (4.1 kg/kapita), kacang-kacangan (5.3 kg/kapita), gula (6.4 kg/kapita), sayur dan buah (10.5 kg/kapita) serta kelompok lain-lain (1,56 kg/kapita) per tahun.

Realisasi pemenuhan kebutuhan pangan wilayah di Kota Bogor Tahun 2023 menunjukkan pola yang sama dengan capaian pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk perkapita pada tahun yang sama. Kelompok pangan yang realisasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan wilayahnya telah melebihi estimasi idealnya berdasarkan Pola Pangan Harapan hanyalah kelompok padi-padian (129.4 ribu ton), pangan hewani (52.7 ribu ton), dan minyak dan lemak (12.9 ribu ton) per tahun. Untuk dapat mencapai estimasi ideal kebutuhan konsumsi pangan penduduk di

wilayah Kota Bogor pada masih diperlukan tambahan pangan kelompok umbi-umbian (31.1 ribu ton), buah/biji berminyak (4.4 ribu ton), kacang-kacangan (5.7 ribu ton), gula (6.8 ribu ton), sayur dan buah (11.3 ribu ton) dan kelompok pangan lain-lain (2.1 ribu ton) per tahun.

Hasil kajian Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Penduduk Kota Bogor berdasarkan data Susenas tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi capaian kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan, khususnya dalam upaya perbaikan pola konsumsi dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor. Dengan dukungan data dan informasi dari hasil kajian ini diharapkan sinergisitas kebijakan, strategi dan prioritas permbangunan ketahanan pangan, khususnya di bidang konsumsi pagan, di wilayah Kota Bogor dapat lebih dioptimalkan. Informasi dasar tentang situasi dan estimasi kebutuhan konsumsi pangan penduduk diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholder terkait pembangunan ketahanan pangan di Kota Bogor pada setiap tahapan dan proses pembangunan baik tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan demikian program pembangunan ketahanan pangan, khususnya dalam rangka perbaikan konsumsi pangan penduduk di wilayah Kota Bogor dapat terlaksana secara lebih effektif & effisien.

Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mensosialisasikan dan mengadvokasikannya kepada berbaga stakeholder terkait. Berbagai strategi & program pembangunan bidang ketahanan pangan perlu terus ditingkatkan dengan dukungan program perbaikan ekonomi & kesejahteraan masyarakat. Penguatan akses pangan penduduk melalui upaya peningkatan daya beli pangan masyarakat yang diimbangi dengan penguatan kesadaran tentang pentingnya makanan bergizi, beragam dan

berimbang menjadi strategi & program pokok ketahanan pangan di wilayah Kota Bogor.

Hasil analisis estimasi kebutuhan konsumsi pangan dalam kajian ini hanya mempertimbangkan kebutuhan pangan untuk konsumsi penduduk di tingkat rumahtangga. Oleh karena itu, dalam menghitung kebutuhan konsumsi pangan wilayah secara keseluruhan perlu ditambah lagi dengan estimasi kebutuhan konsumsi pangan penduduk di luar rumahtangga, khususnya di rumah sakit, hotel dan restoran, lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Selain itu, untuk mengestimasi lebih jauh tentang total kebutuhan pangan wilayah harus pula mempertimbangkan kebutuhan pangan wilayah untuk non konsumsi penduduk, seperti : industri, energi alternatif, dan lain-lain. Dengan demikian, analisis tentang kebutuhan pangan akan lebih komprehensif, sehingga dapat mencakup kebutuhan pangan untuk konsumsi penduduk maupun untuk kebutuhan lainnya.

Agar hasil kajian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dasar pembangunan ketahanan pangan di wilayah Kota Bogor, maka perlu dilakukan analisis lebih komprehensif paling tidak mencakup data satu periode RPJMD Kota Bogor yang telah lalu. Dengan demikian dapat dilakukan analisis tren pertumbuhan pada setiap variabel atau indikator pokok situasi konsumsi pangan. Hasil analisis tren pertumbuhan tersebut merupakan salah satu faktor utama yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam analisis sasaran konsumi dan estimasi kebutuhan konsumsi pangan periode RPJM berikutnya.

Selain itu, lebih baik lagi jika dapat disukung dengan kajian mendalam tentang disparitas dan preferensi konsumsi pangan masyarakat untuk menggali berbagai faktor determinan yang berperan dalam membentuk pola konsumsi pangan penduduk di wilayah Kota Bogor.

Dengan demikian, diharapkan dapat disusun berbagai strategi dan alternatif program ketahanan pangan yang effektif dan effisien pada berbagai tingkat sasaran mulai dari tingkat individu, rumah tangga dan lembaga maupun wilayah.

Hasil analisis situasi konsumsi dan estimasi kebutuhan konsumsi pangan tersebut perlu disinergiskan pula dengan hasil analisis ketersediaan pangan wilayah. Berdasarkan hasil analisis awal tentang capaian pola konsumsi dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan serta ketersediaan pangan wilayah tersebut, maka dapat dilakukan kajian lebih lanjut tentang analisis penyediaan pangan wilayah. Pada analisis tahap ini fokus kajian sudah mensinergiskan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan dengan potensi dan daya dukung wilayah, baik potensi agroekologi maupun sosial ekonomi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya ilmiah Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kota Bogor dapat diselesaikan. Hasil kajian ini merupakan pengembangan dari laporan kegiatan penyusun sebagai tenaga ahli pendamping pada kegiatan Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan pada Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi, Tahun Anggaran 2024 di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor.

Situasi konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari ukuran kuantitas maupun kualitas konsumsi pangan penduduk berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) yang menggambarkan capaian kinerja pembangunan dalam penganekaragaman konsumsi pangan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memeberikan gambaran tentang capaian Tingkat Kecukupan Energi (TKE) dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor. Selain itu, hasil kajian diharapkan pula dapat memberikan gambaran estimasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor.

Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait Ketahanan Pangan di lingkup Pemerintah Kota Bogor, serta semua pihak yang bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan ini, khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, Badan Pusat Statistik Kota Bogor dan Badan Pangan Nasional.

Bogor, Mei 2025

Penyusun
Yayat Heryatno
Departemen Gizi Masyarakat
FEMA – IPB University

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Analisis	3
C. Kegunaan Analisis	3
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Landasan Hukum dan Kebijakan	4
B. Landasan Teoritis dan Metodologis.....	11
C. Definisi Atau Batasan Istilah	16
III. METODE ANALISIS.....	18
A. Desain dan Waktu Analisis	18
B. Sumber dan Jenis Data Analisis.....	19
C. Pengolahan dan Analisis Data.....	19
IV. KEADAAN UMUM WILAYAH KOTA BOGOR.....	24
A. Geografi.....	24
B. Agroekologi	25
C. Demografi.....	28
D. Ekonomi.....	30
V. ANALISIS SITUASI KONSUMSI PANGAN PENDUDUK.....	36
A. Pola Konsumsi Pangan Penduduk	36
B. Konsumsi dan Kecukupan Gizi	37
C. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	42
D. Gap Situasi Konsumsi Pangan.....	43
VI. ANALISIS KEBUTUHAN KONSUMSI PANGAN.....	47
A. Kebutuhan Konsumsi Pangan Penduduk.....	47
B. Kebutuhan Konsumsi Pangan Wilayah	48
VII. KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

Tabel II.B.1.	Perbandingan Beberapa Standar Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ideal	13
Tabel II.B.2.	Susunan PPH Ideal dan Estimasi Berat Konsumsi Pangan Berdasarkan Standar Ideal Nasional	15
Tabel III.B.1.	Jenis dan Sumber Data Pokok Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kota Bogor	19
Tabel V.A.1.	Situasi Pola Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kota Bogor Tahun 2023.	36
Tabel V.B.1.	Kontribusi Energi Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kota Bogor Tahun 2023.....	38
Tabel V.B.2.	Kontribusi Protein Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kota Bogor Tahun 2023.....	39
Tabel V.B.3.	Capaian Kecukupan Energi dan Protein Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kota Bogor Tahun 2023.....	40
Tabel V.C.1.	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kota Bogor Tahun 2023	42
Tabel V.D.1.	Gap Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kota Bogor Tahun 2023.....	44
Tabel V.D.2.	Gap Kontribusi Kecukupan Energi Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kota Bogor Tahun 2023.....	45
Tabel V.D.3.	Gap Kuantitas Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kota Bogor Tahun 2023.....	45
Tabel VI.A.1.	Estimasi Kebutuhan Konsumsi Pangan Per Kapita Penduduk di Kota Bogor Tahun 2023	47
Tabel VI.B.1.	Estimasi Kebutuhan Konsumsi Pangan Penduduk Per Tahun di Kota Bogor Tahun 2023	49

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan di Indonesia. Pencapaian ketahanan pangan nasional yang diawali dengan perwujudan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Negara atau wilayah dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik jika mampu menyelenggarakan pasokan pangan yang stabil dan masing-masing rumah tangga mampu memperoleh pangan sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, terdapat suatu jaminan bagi seluruh penduduk untuk memperoleh pangan dan gizi yang cukup untuk menghasilkan generasi yang sehat dan cerdas.

Pangan adalah kebutuhan dasar hayati manusia yang paling utama, karena itu pemenuhan kebutuhan pangan merupakan bagian dari hak azasi individu. Selain itu juga pangan memegang peranan yang paling penting penting dalam rangka pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas, sehat dan produktif. Mengingat pentingnya hal ini, setiap negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai fondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2004). Oleh karena itu, bidang ketahanan pangan menjadi salah satu urusan wajib pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan

bergizi seimbang baik pada tingkat nasional, daerah hingga rumahtangga. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Ketahanan pangan terwujud apabila telah memenuhi dua aspek sekaligus. Pertama, tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk seluruh penduduk. Kedua, setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.

Permasalahan pokok terkait ketahanan pangan di tingkat rumahtangga yang memegang peranan penting adalah aspek pola konsumsi pangan masyarakat. Beberapa permasalahan konsumsi pangan antara lain adalah: (a) Besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan daya beli pangan yang rendah, (b) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi konsumsi pangan dan gizi, (c) Masih dominannya konsumsi energi yang berasal dari beras dan (d) Rendahnya kesadaran dalam penerapan sistem sanitasi dan higienis serta keamanan pangan.

Salah satu jenis pelayanan dasar bidang ketahanan pangan adalah penganekaragaman konsumsi pangan. Perkembangan konsumsi pangan penduduk merupakan salah satu indikator kinerja bidang ketahanan pangan, sekaligus mencerminkan keberhasilan urusan wajib bidang ketahanan pangan oleh pemerintah Kota/kota.

Oleh karena itu, konsumsi pangan penduduk merupakan pondasi ketahanan pangan yang harus selalu dipantau secara rutin oleh unit kerja ketahanan pangan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam bentuk analisis perkembangan situasi konsumsi pangan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang kuantitas dan kualitas konsumsi pangan penduduk. Pada gilirannya, informasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kebijakan dan perencanaan konsumsi dan kebutuhan pangan penduduk.

Dalam rangka mewujudkan upaya di atas, pada tahun anggaran 2024, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kota Bogor secara khusus telah melaksanakan kegiatan Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kota Bogor. Informasi yang diperoleh diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam evaluasi capaian kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan, khusunya dalam upaya perbaikan pola konsumsi dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor.

B. Tujuan Analisis

Secara umum tujuan kajian ini adalah menganalisis Pola Pangan Harapan konsumsi pangan penduduk Kota Bogor berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional. Secara lebih khusus kajian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis situasi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kota Bogor berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH).
2. Menganalisis estimasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor.

C. Kegunaan Analisis

Tersedianya informasi tentang Pola Pangan Harapan konsumsi pangan penduduk Kota Bogor berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional sebagai bahan evaluasi capaian kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan, khusunya dalam upaya perbaikan pola konsumsi dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Hukum dan Kebijakan

Aspek kebijakan pembangunan yang erat kaitannya dengan birokrasi, sangat menentukan efektifitas dan efisiensi dari kegiatan perencanaan pembangunan. Bahkan lebih dari itu, kebijakan pembangunan sangat berpengaruh pada operasionalisasi dan keberhasilan implementasi suatu program pembangunan.

Perencanaan pembangunan tidak dapat terlepas dari aspek hukum dan kebijakan pembangunan. Aspek hukum menentukan hal-hal pokok seperti dasar hukum yang mengamanatkan suatu kegiatan perencanaan, aturan bagaimana dan oleh siapa perencanaan itu dilakukan atau proses administrasinya, bagaimana legalitas suatu proses pembangunan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dilaksanakan untuk

20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan selama 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun. RPJPD disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), sedangkan RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD. RPJMD disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sementara itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang disusun selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Renstra (Rencana Strategis) SKPD disusun berpedoman pada RPJMD. Renja (Rencana Kerja) SKPD merupakan penjabaran dari Renstra. Renja SKPD disusun berpedoman pada RKPD. RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) SKPD merupakan penjabaran dari Renja SKPD. RKA SKPD dikompilasi menjadi RAPBD. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran setelah APBD disetujui. DPA disusun berdasarkan penjabaran APBD untuk setiap SKPD.

Beberapa produk hukum dan kebijakan yang menjadi dasar pertimbangan dalam kajian atau analisis terkait pembangunan ketahanan pangan di wilayah Kota Bogor antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2017-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2012 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang ketahanan Pangan Provinsi dan Kota/Kota;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1329);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
17. Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pola Pangan Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 237);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 I - 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
 21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
 22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
 23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E).
 24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 118);
 25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011

- tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2021); dan
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Pemenuhan pangan dasar bagi masyarakat juga amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan. Pemenuhan hak dasar atas pangan dicerminkan pada definisi ketahanan pangan yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang sangat besar arti dan manfaatnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan secara nasional.

Lebih jauh undang-undang tersebut menjelaskan bahwa: 1) Pasal 60 Ayat 1: Pemerintah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif; 2) Pasal 60 Ayat 2: Penganekaragaman konsumsi pangan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal; Pasal 62 : Tercapainya penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan ketahanan pangan di Kota/kota mencakup 4 urusan dan 9 sub-urusan, yaitu: 1),

Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemadirian (urusan Kota/kota adalah penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah Kota/kota); 2). Penyelenggaraan ketahanan pangan urusan Kota/kota adalah : a) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah Kota/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, b) pengelolaan cadangan pangan Kota/kota, c) penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, d) pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi); 3). Penanganan kerawanan pangan (urusan Kota/kota adalah: a) penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan, b) penanganan kerawanan pangan, c) pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan); (4) Keamanan pangan (urusan Kota/kota adalah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar).

Penganekaragaman konsumsi pangan penduduk termasuk kedalam salah satu jenis pelayanan dasar pembangunan bidang ketahanan pangan. Oleh karena itu, perkembangan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan penduduk merupakan salah satu indikator kinerja bidang ketahanan pangan, sekaligus mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bidang ketahanan pangan oleh pemerintah Kota/kota. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengatur secara lebih detail terkait dengan hal tersebut, antara lain:

- 1) Pasal 25 : Penganekaragaman pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:
 - a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau

- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Pasal 26 Ayat 1: Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan melalui:
 - a. penetapan kaidah penganekaragaman pangan;
 - b. pengoptimalan pangan lokal;
 - c. dan seterusnya.
- 3) Pasal 27 Ayat 1 : Penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. prinsip gizi seimbang;
 - b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
 - c. ramah lingkungan; dan
 - d. aman.
- 4) Pasal 27 Ayat 2: Prinsip gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a diukur dengan Pola Pangan Harapan dan/atau ukuran lainnya.
- 5) Pasal 27 Ayat 3: Ketentuan mengenai Pola Pangan Harapan dan/atau ukuran lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah.

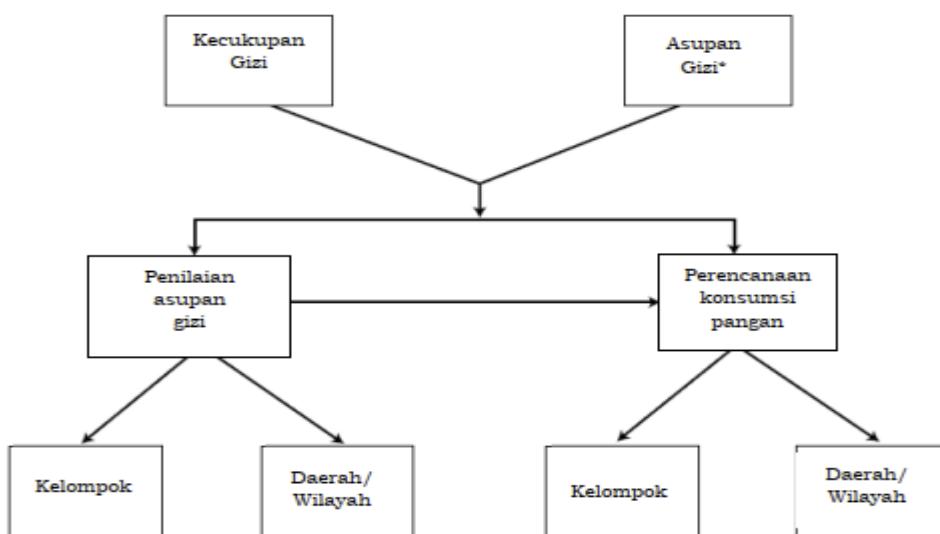
B. Landasan Teoritis dan Metodologis

Upaya perbaikan gizi sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat. Acuan untuk merencanakan dan menilai pemenuhan konsumsi gizi seseorang disebut kebutuhan gizi (nutrient requirement), sedangkan acuan untuk merencanakan dan menilai konsumsi pangan kelompok orang atau masyarakat di suatu daerah/wilayah disebut kecukupan gizi (nutrient allowances atau Recommended Dietary Allowances/RDA).

Di Indonesia, *recommended dietary allowances* disebut juga dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG). AKG pertama kali ditetapkan pada tahun 1968, selanjutnya diperbaharui melalui Widyakarya Nasional Pangan

dan Gizi (WNPG). AKG yang pertama terdiri dari energi, protein, 5 vitamin dan 2 mineral. AKG terbaru di Indonesia berdasarkan ketetapan WNPG tahun 2018 mencakup energi, semua zat gizi makro (protein, lemak dan karbohidrat serta air), 14 vitamin, dan 14 mineral termasuk elektrolit. Pada dasarnya penggunaan AKG dapat dibagi menjadi dua kategori besar yaitu untuk penilaian asupan zat gizi dari konsumsi pangan dan untuk perencanaan konsumsi pangan.

Sejak ditetapkannya AKG dan pembaharuananya secara berkala hingga kini, berbagai kebijakan dan program telah menggunakan AKG, antara lain perencanaan penyediaan pangan, penggunaan AKG untuk penetapan garis kemiskinan, penggunaan AKG untuk penetapan upah minimum, penggunaan AKG untuk penetapan skor Pola Pangan Harapan (PPH), penggunaan AKG untuk penetapan panduan gizi seimbang, dan penggunaan AKG untuk Penetapan Acuan Label Gizi (ALG).



Gambar II.B.1. Penggunaan Angka Kecukupan Gizi untuk Penilaian Asupan Gizi dan Perencanaan Konsumsi Pangan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan/atau

konsumsi pangan. FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH sebagai "komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya". Dengan demikian, PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah, maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Dengan pendekatan PPH ini mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari skor pangan (dietary score) dan dikenal sebagai Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang gizinya.

Dalam perhitungan skor PPH, pangan dikelompokkan menjadi sembilan, yaitu (1) padi-padian (beras, jagung, terigu dan hasil olahannya); (2) umbi-umbian/pangan berpati (ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, sagu dan hasil olahannya); (3) pangan hewani (ikan, daging, telur, susu, dan hasil olahannya); (4) minyak dan lemak (minyak kelapa, minyak jagung, minyak goreng/kelapa sawit, dan margarin); (5) buah dan biji berminyak (kelapa, kemiri, kenari, mete, coklat); (6) kacang-kacangan (kedele, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang polong, kacang tunggak dan kacang lainnya); (7) gula (gula pasir, gula merah/mangkok dan sirup); (8) sayuran & buah (semua jenis sayuran & buah-buahan) (FAO-RAPA, 1989).

Tabel II.B.1. Perbandingan Beberapa Standar Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ideal

No.	Kelompok Pangan	FAO-RAPA		Meneg Pangan 1994			Deptan 2001		
		%	Interval	%	Bobot	Skor	%	Bobot	Skor
1.	Padi-padian	40	40 – 60	50	0.5	25	50	0.5	25,0
2.	Umbi-umbian	5	0 – 8	5	0.5	2.5	6	0.5	2.5
3.	Pangan Hewani	20	5 – 20	15	2,0	30.6	12	20,0	24,0
4.	Minyak & lemak	10	5 – 15	10	1,0	10.0	10	0.5	5,0
5.	Buah/biji berminyak	3	0 – 3	3	0.5	1.5	3	0.5	1,0

6.	Kacang-kacangan	6	2 – 10	5	2,0	10.0	5	2,0	10,0
7.	Gula	8	2 – 15	6.7	0.5	3.4	5	0.5	2.5
8.	Sayur dan Buah	5	3 – 8	5	2,0	10.0	6	5,0	30,0
9.	Lain-lain	3	0 – 5	0	0,0	0.0	3	0,0	0,0
		100		100		93.0	100		100

Menurut hasil Workshop on Food and Agriculture Planning for Nutritional Adequance di jakarta tanggal 11-13 Oktober 1989, komposisi pangan bagi total wilayah direkomendasikan sebagai berikut : kelompok padi-padian sekitar 50%, makanan berpati sekitar 5%, pangan hewani 15-20%, minyak dan lemak lebih dari 10%, kacang-kacangan sekitar 5%, gula 6-7%, buah dan sayur 5% (FAO-MOA, 1989).

Standar perhitungan skor PPH menurut Deptan (2001) merupakan penyempurnaan dari pola pangan harapan berdasarkan anjuran FAO-RAPA (1989) dengan menerapan sistem skor untuk penilaian konsumsi pangan berdasarkan Guthrie et al (1981), yaitu setiap kelompok pangan utama (tiga kelompok pangan utama) diberikan skor maksimum yang relatif sama, yaitu 33.3 bagi setiap kelompok pangan utama (berasal dari 100 dibagi 3). Kelompok pangan tersebut adalah (a) pangan sumber karbohidrat dan energi (serealia, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak dan gula) dengan kontribusi energi 74%; (b) pangan sumber protein/lauk-pauk (kacang-kacangan dan pangan hewani) dengan kontribusi energi 17%; (c) pangan sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah) dengan kontribusi energi 6% dan (d) pangan lainnya (aneka minuman dan bumbu) dengan kontribusi energi 3%. Rating 0.5 diperoleh dari nilai 33.3 dibagi 74; rating 2.0 diperoleh dari nilai 33.3 dibagi 17; dan rating 5.0 diperoleh dari nilai 33.3 dibagi 6. Masing-masing hasil dibulatkan untuk kembali mendapatkan total skor PPH = 100. Tabel II.B.2 menyajikan Standar Perhitungan Skor PPH Ideal Nasional dan Estimasi Berat Konsumsi Pangan.

Penyempurnaan Standar Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ideal di Indonesia yang disajikan pada Tabel II.B.2. mengacu pada

rumusan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian tahun 2015 sebagaimana disajikan pada Tabel II.B.1. Beberapa pertimbangan pokok yang digunakan dalam perumusan, antara lain: (1) Angka Kecukupan Energi (AKE) berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 1998 sebesar 2000 kkal/kapita/hari atau WNPG Tahun 2012 sebesar 2150 kkal/kapita/hari atau WNPG Tahun 2018 sebesar 2100 kkal/kapita/hari; (2) Perubahan AKE sebaiknya menunggu berakhirnya periode RPJM berjalan dan digunakan saat menetapkan sasaran kinerja periode RPJM berikutnya; (3) Persentase energi untuk perhitungan skor PPH dihitung terhadap AKE; (4) Bobot disempurnakan sesuai teori rating; (5) Skor maksimum PPH adalah 100; (6) Peran pangan hewani, gula, serta sayur dan buah disesuaikan dengan PUGS; (7) Peran umbi-umbian ditingkatkan sejalan dengan kebijakan diversifikasi pangan pokok dan pengembangan pangan lokal; (8) Peran makanan lainnya terutama bumbu dan minuman lainnya tidak diabaikan; (9) Untuk Beberapa daerah yang memiliki karakteristik dan potensi wilayah serta preferensi pangan masyarakat yang dianggap spesifik diperlukan penyesuaian.

Tabel II.B.2. Susunan PPH Ideal dan Estimasi Berat Konsumsi Pangan Berdasarkan Standar Ideal Nasional

No.	Kelompok Pangan	Kecukupan Energi Per Kapita		Standar Perhitungan PPH		Estimasi Berat (gr/kap/hari)
		kkal/hari	%AKE	Bobot	Skor	
1.	Padi-padian	1050	50	0,5	25,0	289
2.	Umbi-umbian	126	6	0,5	2,5	95
3.	Pangan Hewani	252	12	2,0	24,0	147
4.	Minyak & lemak	210	10	0,5	5,0	26
5.	Buah/biji berminyak	63	3	0,5	1,0	11
6.	Kacang-kacangan	105	5	2,0	10,0	37
7.	Gula	105	5	0,5	2,5	32
8.	Sayur dan Buah	126	6	5,0	30,0	242
9.	Lain-lain	63	3	0,0	0,0	16
		2100	100		100,0	

Standar PPH berguna sebagai instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan, berupa jumlah dan komposisi pangan menurut kelompok pangan. PPH juga berguna untuk perencanaan konsumsi maupun ketersediaan pangan. Dengan pendekatan PPH, perencanaan konsumsi dan ketersediaan pangan penduduk di masa mendatang diharapkan dapat mencapai ideal, yaitu tidak hanya memenuhi kecukupan gizi (nutritional adequacy) akan tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutritional balance) yang didukung oleh cita rasa (palatability), daya cerna (digestability), daya terima masyarakat (acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli (affordability).

C. Definisi Atau Batasan Istilah

Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan & kesehatan manusia.

Angka Kecukupan Energi adalah rata-rata jumlah energi yang diperlukan oleh setiap orang dalam suatu populasi di suatu wilayah untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif.

Angka Kecukupan Protein adalah rata-rata jumlah protein yang diperlukan oleh setiap orang dalam suatu populasi di suatu wilayah untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan/atau konsumsi pangan.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata

dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Pangan Strategis yang dimaksud dalam analisis ini adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat serta banyak dikonsumsi oleh penduduk dibandingkan dengan jenis pangan lainnya.

Konsumsi Pangan Aktual adalah jumlah dan jenis pangan yang biasanya dikonsumsi penduduk dalam satuan gram/kapita/hari atau kg/kapita/tahun.

Konsumsi Pangan Ideal adalah jumlah dan jenis pangan yang semestinya dikonsumsi penduduk dalam satuan gram/kapita/hari atau kg/kapita/tahun yang mengacu pada pemenuhan kecukupan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan.

Kebutuhan Konsumsi Pangan adalah jumlah dan jenis pangan yang semestinya tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam satuan gram/kapita/hari atau kg/kapita/tahun yang mengacu pada pemenuhan kecukupan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan.

III. METODE ANALISIS

A. Desain dan Waktu Analisis

Kegiatan Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kota Bogor, menggunakan desain *explorative study* dengan menggali informasi untuk merumuskan karakteristik khas dari subjek yang dikaji secara deskriptif. Pendekatan *retrospective study* digunakan untuk mengkaji kecenderungan tertentu berdasarkan data & dan informasi yang ada. Selain itu digunakan pula pendekatan *prospective study* untuk mengestimasi kebutuhan konsumsi pangan ideal. Adapun lingkup kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi bahan pustaka terkait dengan peraturan dan perundang-undangan, kebijakan dan strategi serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan pangan yang bersumber dari intansi pemerintah atau lembaga-lembaga terkait lainnya.
2. Inventarisasi data-data sekunder yang digunakan dalam analisis, khususnya data-data yang terkait dengan karakteristik sosial ekonomi, demografi, dan agroekologi serta konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor yang bersumber dari publikasi dan/atau laporan statistik intansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor atau lembaga-lembaga terkait lainnya.
3. Pengolahan dan analisis data, yang mencakup perhitungan rata-rata kuantitas konsumsi pangan, kecukupan energi dan protein, skor Pola Pangan Harapan, serta estimasi kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor.
4. Penyusunan laporan hasil analisis, yang secara garis besar mencakup bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, metode analisis, keadaan umum wilayah, analisis situasi konsumsi pangan, analisis dan estimasi kebutuhan konsumsi pangan, serta kesimpulan dan saran.

B. Sumber dan Jenis Data Analisis

Sumber data pokok yang digunakan dalam Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kota Bogor ini didasarkan pada data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kota Bogor Tahun 2023 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data pokok yang digunakan dalam analisis adalah data konsumsi pangan penduduk yang disajikan dalam bentuk tabel rata-rata konsumsi pangan per komoditas dalam satuan URT per kapita/minggu. Adapun jenis dan sumber data pokok yang digunakan dalam Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kota Bogor disajikan dalam Tabel II.B.1.

Tabel III.B.1. Jenis dan Sumber Data Pokok Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kota Bogor

No	Jenis Data	Parameter Pokok	Tahun Data	Sumber Data	
				Publikasi	Intansi
1	Konsumsi Pangan Penduduk	Rata-rata kuantitas konsumsi pangan penduduk per komoditas dalam satuan URT per kapita/minggu	2023	Data Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2023	Badan Pusat Statistik Badan Pangan Nasional
2	Karakteristik Geografi dan Demografi Wilayah	Luas Wilayah Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	2023	Kota Bogor Dalam Angka Tahun 2024	Badan Pusat Statistik Kota Bogor
3	Karakteristik Ekonomi Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita dan lain-lain	2023	Statistik Daerah Kota Bogor 2024	Badan Pusat Statistik Kota Bogor

C. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara sistematis dan metodologis dalam rangka mempersiapkan data agar dapat dikaji dan digunakan sesuai tujuan pokok kajian. Tahap pertama yang dilakukan setelah semua data terkumpul dan semua instrumen terisi dengan baik

adalah rekapitulasi. Tahapan pengolahan data yang tidak kalah pentingnya adalah editing data. Editing data merupakan suatu proses pengelolaan data dalam rangka mempersiapkan data sebelum data dientri dan dianalisis lebih lanjut, yang meliputi : pengecekan ulang dan penyesuaian unit atau satuan data. Editing data bertujuan untuk menghindari adanya kekeliruan data yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan dan perbedaan unit atau satuan data.

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang sistematis dan praktis dalam bentuk Aplikasi Komputer Harmonisasi Analisis Pola Pangan Harapan Berdasarkan Data Susenas Tahun 2023 yang dikembangkan atas kerjasama Badan Pangan Nasional Pangan (Bapanas) Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Aplikasi tersebut disusun dalam bentuk Spreadsheet Microsoft Excel for Windows. Agar hasil analisis menjadi lebih akurat serta memiliki kekuatan analisis dan taraf signifikansi yang baik, maka telah dilakukan cleaning terhadap data hasil entri pada aplikasi komputer. Cleaning data adalah suatu proses check and recheck terhadap nilai-nilai data pada data hasil entri data sebelum dilakukan proses analisis terhadap data.

Secara umum analisis dilakukan terhadap berbagai data sekunder yang berhasil dikumpulkan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan analisis kuantitatif digunakan untuk menyajikan dan menganalisa keragaan statistik berbagai jenis indikator situasi ketahanan pangan, khususnya situasi konsumsi pangan penduduk. Parameter statistik banyak digunakan adalah rata-rata dan persentasi. Untuk memudahkan pembahasan hasil analisis sebagian besar data disajikan dalam bentuk tabel ringkasan.

Terkait dengan analisis situasi konsumsi pangan penduduk berdasarkan pendekatan Pola Pangan Harapoan (PPH) dengan menggunakan data Susenas, secara metodologis terdapat dua hal yang

perlu dipertimbangkan, yaitu : 1) Metode "recall" seminggu berpotensi terjadinya under/over estimate data konsumsi pangan yang diingat oleh responden; dan 2) Keterbatasan jenis makanan jadi dan makanan yang dikonsumsi di luar rumah yang terdapat dalam kuesioner Susenas. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penilaian konsumsi pangan menjadi kurang menggambarkan kondisi konsumsi pangan penduduk yang sesungguhnya. Oleh karena itu, diperlukan justifikasi agar data konsumsi pangan penduduk berdasarkan data Susenas lebih mendekati kondisi riil.

Indikator utama situasi konsumsi pangan yang dianalisis mencakup aspek kuantitas dan kualitas. Aspek kuantitas yang dianalisis berdasarkan mencakup total dan/atau rata-rata konsumsi pangan menurut jenis dan kelompok pangan, tingkat kecukupan energi dan protein, serta pencapaian skor Pola Pangan Harapan konsumsi pangan. Tingkat kecukupan energi (TKE) dan protein (TKP) serta skor Pola Pangan Harapan (PPH). Perhitungan dan analisis TKE, TKP dan skor PPH Tahun 2023 didasarkan pada AKE sebesar 2100 kkal/kapita/hari energi dan AKP sebesar 57 gram/kapita/hari protein serta standar PPH Ideal Nasional.

Untuk menganalisis kualitas konsumsi pangan digunakan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor maksimal 100 yang mengacu pada standar PPH Nasional yang ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, dengan kontribusi energi terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) yang ideal untuk masing-masing kelompok pangan adalah sebagai berikut : 50% padi-padian, 6 % umbi-umbian, 12 % pangan hewani, 10 % minyak dan lemak, 3 % buah/biji berminyak, 5 % kacang-kacangan, 5 % gula, 6 % sayur dan buah, dan 3 % lain-lain. Adapun langkah menghitung skor PPH konsumsi pangan penduduk adalah sebagai berikut:

- 1) Menghitung nilai jumlah energi yang diperoleh dari setiap jenis pangan yang dikonsumsi

- 2) Mengelompokkan pangan kedalam 9 kelompok pangan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan
- 3) Menghitung nilai total dan sub total energi masing-masing kelompok pangan
- 4) Menghitung kontribusi energi berdasarkan dalam persentase masing-masing kelompok pangan terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan.
- 5) Mengalikan kontribusi energi dengan bobot masing-masing kelompok pangan sesuai dengan standar perhitungan PPH Ideal Nasional, sehingga diperoleh skor untuk setiap kelompok pangan.
- 6) Apabila nilai hasil perhitungan melebihi nilai ideal maka digunakan nilai ideal, dan apabila nilai hasil perhitungan kurang dari nilai ideal maka digunakan nilai hasil perhitungan sebagai skor.
- 7) Menjumlahkan skor semua kelompok pangan sehingga diketahui skor PPH konsumsi pangan.

Berdasarkan kontribusi energi sesuai standar perhitungan skor PPH Ideal dan AKE nasional sebesar 2100 kkal/kapita/hari maka kontribusi energi konsumsi pangan yang ideal untuk masing-masing kelompok pangan adalah sebagai berikut : padi-padian (1050 kkal), umbi-umbian (126 kkal), pangan hewani (252 kkal), minyak dan lemak (210 kkal), buah/biji berminyak (63 kkal), kacang-kacangan (105 kkal), gula (105 kkal), sayur dan buah (126 kkal), dan pangan lainnya (63 kkal).

Dengan mengkonversi kontribusi energi tersebut kedalam berat jenis pangan acuan masing-masing kelompok pangan, maka rata-rata berat pangan yang ideal untuk masing-masing kelompok pangan adalah setara dengan sekitar : 289 gram padi-padian, 95 gram umbi-umbian, 147 gram pangan hewani, 26 gram minyak dan lemak, 11 gram buah/biji berminyak, 37 gram kacang-kacangan, 32 gram gula, 242 gram sayur dan buah, dan 16 gram pangan lainnya. Adapun jenis pangan acuan masing-masing kelompok pangan yang digunakan adalah sebagai berikut : padi-

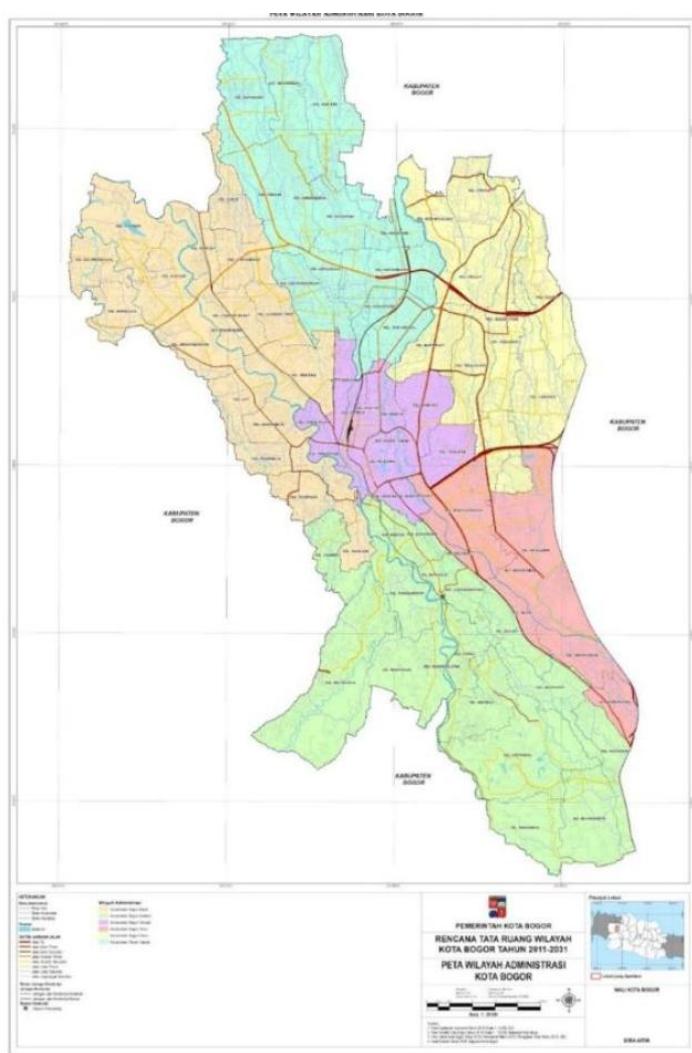
padian (beras giling), umbi-umbian (ubi kayu), pangan hewani (daging sapi), minyak dan lemak (minyak kelapa sawit), buah/biji berminyak (kelapa tua daging), kacang-kacangan (kacang tanah), gula (gula pasir), sayur dan buah (bayam), dan lain-lain (merica).

Estimasi kebutuhan konsumsi pangan ideal per jenis pangan didasarkan pada persen energi suatu jenis pangan pada kelompok pangan masing-masing dikalikan jumlah energi ideal tiap kelompok dengan asumsi kontribusi antar jenis pangan tidak berubah. Estimasi berat pangan ideal untuk suatu jenis pangan diperoleh dari hasil konversi jumlah energi ideal tiap jenis pangan kedalam berat pangan. Jumlah kebutuhan konsumsi pangan penduduk tersebut didasarkan pada angka rata-rata konsumsi pangan ditambah 10%. Estimasi kebutuhan konsumsi pangan wilayah tahun tertentu dihitung berdasarkan perkalian rata-rata kebutuhan konsumsi pangan (kg/kapita/tahun) dengan jumlah penduduk tahun yang sama. Hasil estimasi kebutuhan pangan wilayah untuk mencapai sasaran skor PPH pada periode waktu tertentu dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menentukan strategi pemenuhan kebutuhan pangan wilayah. Selain informasi tentang kelompok jenis pangan apa saja yang masih perlu ditingkatkan, hasil analisis tersebut juga dapat menjadi acuan estimasi tingkat pertumbuhan yang diperlukan agar target tersebut dapat dicapai.

IV. KEADAAN UMUM WILAYAH KOTA BOGOR

A. Geografi

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara $106^{\circ} 48' BT$ dan $6^{\circ} 26' LS$, kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kota Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata.



Gambar IV.A.1. Peta Wilayah Kota Bogor (Sumber: Perda Kota Bogor No 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031)

Luas wilayah Kota Bogor sebesar 111,3858 km² yang terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Keenam kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat, dan Kecamatan Tanah Sareal. Kecamatan Bogor Selatan mempunyai luas wilayah terbesar yaitu 30,50 km², sedangkan Kecamatan Bogor Tengah mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 8,37 km².

Secara administratif Kota Bogor dikelilingi oleh Kabupaten Bogor dengan batas wilayah sebagai berikut: 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor; 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor; 3) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciomas, dan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor; dan 4) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Cijeruk, dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

B. Agroekologi

Kondisi iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 26° C dengan suhu terendah 21° C dengan suhu tertinggi 34° C. Kelembaban udara 80 %. Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut. Kondisi geologi di Kota Bogor umumnya tersusun oleh batuan vulkanik dari Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango. Batuan vulkanik dari gunung tersebut tersebar di bagian selatan Kota Bogor, sedangkan bagian utara tersusun oleh material hasil pelapukan batuan vulkanik. Kemudian untuk batuan di sekitar aliran sungai utama berupa endapan aluvium yang terdiri dari kerikil dan pasir.

Jenis tanah hampir diseluruh wilayah Kota Bogor adalah latosol coklat kemerahan dengan luasan 8.496,35 hektar, kedalaman efektif tanah lebih dari 90 centimeter dengan tekstur tanah yang halus

serta bersifat agak peka terhadap erosi. Kemudian jenis tanah lain yang juga menyebar di enam Kecamatan yaitu aluvial kelabu dengan luasan 1.157,9 hektar.

Kota Bogor mempunyai wilayah dengan kontur berbukit dan bergelombang dengan ketinggian bervariasi, ketinggian minimum 190 meter dan ketinggian maksimum 330 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Bogor memiliki lahan datar dengan kemiringan berkisar 0–8 persen, untuk luasan lahan datar seluas 10.415,03 hektar dan tersebar di enam kecamatan. Seluas 651,57 hektar merupakan lahan landai dengan kemiringan berkisar 9–15 persen, seluas 63,88 hektar merupakan lahan agak curam dengan kemiringan 16–25 persen, seluas 7,10 hektar merupakan lahan curam dengan kemiringan 26–40 persen dan lahan sangat curam seluas 0,84 hektar dengan kemiringan lebih dari 40 persen.

Lahan dengan kemiringan lebih dari 40% tersebar di Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Tanah Sareal. Sedangkan untuk Kecamatan Bogor Utara tidak memiliki lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen. Kecamatan Bogor Barat merupakan daerah di Kota Bogor yang tergolong sangat rawan terhadap bahaya longsor, karena mempunyai lahan terluas dengan kemiringan lebih dari 40 persen atau sangat curam yaitu 0,31 Ha sehingga daerah tersebut sangat rawan terhadap bahaya longsor.

Kemudian setelah Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Tengah juga memiliki luasan lahan sangat curam sebesar 0,25 Ha. Dengan luasan tersebut, dua kecamatan tersebut juga tergolong kawasan yang rawan terhadap bahaya longsor. Untuk Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Tanah Sareal masing-masing memiliki lahan sangat curam 0,02 Ha dan 0,01 Ha.

Berdasarkan data BMKG, kondisi iklim di Kota Bogor tahun 2022 cukup sejuk dengan suhu rata-rata tiap $25,6^{\circ}$ - $26,4^{\circ}\text{C}$ dengan suhu terendah $25,6^{\circ}\text{C}$ di bulan Desember dan suhu tertinggi $26,8^{\circ}\text{C}$ di bulan Juni. Suhu seperti itu antara lain dipengaruhi curah hujan. Curah hujan dengan intensitas tertinggi yaitu 499,6 mm, dan terendah di 106,6 mm dengan rata-rata hujan terendah 13 hari per bulan dan paling tinggi 24 hari per bulan dengan kelembaban udara rata-rata 83% - 87%. Sedangkan kecepatan angin rata-rata per tahun 1,5 - 2 km/jam.

Di wilayah Kota Bogor terdapat enam lokasi mata air, empat lokasi air tanah dalam dan dua lokasi air tanah dangkal yang biasa digunakan untuk air minum non perpipaan. Kapasitas sumber mata air dan air tanah dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini lantaran lahan potensial kritis di Kecamatan Bogor Selatan dan juga yang berada di Kecamatan Bogor Barat menunjukkan semakin berkurangnya resapan air karena semakin bertambahnya daerah pemukiman di wilayah Kota Bogor. Beberapa danau, situ dan kolam di Kota Bogor ada yang berfungsi untuk irigasi, retensi, dan rekreasi. Situ Gede, Situ Panjang, Situ Anggalena dan Situ Leutik difungsikan sebagai irigasi dan retensi. Danau Bogor Raya, Kolam Retensi Cimanggu dan Kolam Retensi Taman Sari Persada selain difungsikan sebagai retensi juga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Danau atau situ terluas di Kota Bogor adalah Situ Panjang (4,5 ha) dan Situ Gede (4 ha).

Di wilayah Kota Bogor dilalui oleh dua buah sungai, yaitu Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung. Sungai Cisadane mempunyai panjang aliran sungai utama hampir 126 kilometer dan Sungai Ciliwung mempunyai panjang aliran sungai utama sepanjang 120 kilometer. Kondisi ini dimanfaatkan sebagai sumber air yang diproduksi PDAM Tirta Pakuan Bogor. Dengan kondisi debit air permukaan diperoleh dari aliran Sungai Ciliwung sebesar 76.000 liter/detik dan Sungai Cisadane sebesar 24.000

liter/detik.

Untuk kualitas air, pada umumnya kualitas air sungai di wilayah Kota Bogor kurang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Hal itu disebabkan beberapa unsur seperti sulfat, fosfat, nitrat dan jumlah total coliform dalam air sungai, melebihi kriteria baku. Kondisi yang mirip juga terdapat pada air situ yang umumnya berkualitas di bawah persyaratan baku mutu. Sedangkan air sumur penduduk, nilai pH-nya cenderung fluktuatif, dan di beberapa lokasi kandungan detergen dan bakteri e-coli sedikit diatas kriteria yang disyaratkan.

Wilayah Kota Bogor memiliki lahan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu Lahan Pertanian dan Lahan Bukan Pertanian. Karakteristik lahan pertanian inilah yang sangat menentukan naik turunnya produksi hasil pertanian dan juga keragamannya. Penggunaan lahan tertinggi di Kota Bogor Sebesar 5.023,59 Hektar atau 45,10 %, merupakan kawasan perumahan dan permukiman. sedangkan untuk lahan pertanian seluas 2.910,97 hektar (26,13%), industri seluas 112,07 hektar (1,006%), perdagangan dan jasa seluas 138,79 hektar (1,24%). Lahan lainnya masih berupa hutan kota seluas 141,13 hektar (1,26%), kebun raya seluas 72,12 hektar (0,61%), serta tempat pemakaman umum seluas 137,87 hektar (1,23%), serta sungai/situ seluas 171,69 hektar (1,54%). Luas kawasan lahan pertanian tanaman pangan di enam kecamatan pada tahun 2021 yaitu 127,42 hektar. Kecamatan Bogor Barat mempunyai luasan kawasan lahan pertanian tanaman pangan terbesar yaitu 77,99 hektar.

C. Demografi

Proyeksi jumlah penduduk di wilayah Kota Bogor pada tahun 2023 adalah sebanyak 1,070,719 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 542.408 orang atau 50,66 persen dari penduduk Kota Bogor. Sementara,

jumlah penduduk perempuan di Kota Bogor sebanyak 528.311 orang, atau 49,34 persen dari penduduk Bogor. Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Kota Bogor sebesar 103, yang artinya terdapat 103 laki-laki per 100 perempuan di Kota Bogor pada tahun 2023. Kepadatan penduduk Kota Bogor sebanyak 9.613 jiwa per kilometer persegi.

Jumlah penduduk Kota Bogor paling besar masih di Kecamatan Bogor Barat. Dengan luas geografis sebesar 20,93 persen wilayah Kota Bogor, Kecamatan Bogor Barat dihuni oleh 239.982 penduduk atau 22,41 persen penduduk Kota Bogor. Jumlah penduduk terbesar kedua terdapat di Kecamatan Tanah Sareal dengan jumlah penduduk sebanyak 226.097 orang, yaitu sebesar 21,12 persen. Sementara jumlah penduduk paling kecil di Kecamatan Bogor Tengah dan Kecamatan Bogor Timur dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 95.978 atau sebesar 8,96 persen dan 106.882 atau sebesar 9,98 persen. Penduduk usia kerja Kota Bogor pada Agustus 2023 sebanyak 824.769 orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 534.532 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 290.237 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2022. TPAK pada Agustus 2023 sebesar 64,81 persen, naik 0,60 persen poin dibandingkan Agustus 2022. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor jasa sebesar 77,29 persen; sektor manufaktur sebesar 21,39 persen; dan Pertanian sebesar 1,32 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 9,39 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar sembilan orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 1,39 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022 (10,78 persen).

D. Ekonomi

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Penyajian PDRB ADHK mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan. PDRB ADHK Kota Bogor mengalami peningkatan setiap tahun. Kontribusi PDRB ADHK Kota Bogor didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; industri pengolahan; transportasi dan pergudangan; konstruksi; informasi dan komunikasi; serta jasa keuangan dan asuransi. Hal ini menunjukkan kegiatan ekonomi Kota Bogor ditopang oleh kegiatan ekonomi perkotaan yang berfokus pada perdagangan, industri, dan penyediaan jasa.

Perdagangan sebagai tempat jual-beli berbagai produk menjadi sektor ekonomi yang potensial di Kota Bogor, sejalan dengan pencapaian Periode 4 (2019-2024) RPJPD Kota Bogor pula yang hendak menjadikannya kawasan bisnis untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri. Untuk sektor industri, Kota Bogor didominasi oleh industri kecil dan menengah, dengan jumlah 1.129 unit dari total 1.189 unit

(Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, 2021). Sedangkan untuk sektor jasa di Kota Bogor, terdapat jasa perdagangan, hotel dan restoran, jasa angkutan dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa pendidikan serta jasa-jasa lainnya yang telah berjalan dalam perkembangannya.

PDRB ADHB Kota Bogor mengalami peningkatan setiap tahun. Kontribusi PDRB ADHB Kota Bogor didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; industri pengolahan; transportasi dan pergudangan; konstruksi; informasi dan komunikasi; serta jasa keuangan dan asuransi. Terlihat bahwa perekonomian Kota Bogor, baik dengan pengaruh inflasi maupun tidak, memiliki karakteristik ekonomi perkotaan, utamanya perdagangan, industri, dan penyediaan jasa, dengan potensi yang telah dijelaskan pada bagian PDRB ADHK.

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan maupun penurunan harga barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi perlu untuk diperhatikan sebagai bagian dari penilaian daya beli masyarakat. Laju inflasi Kota Bogor mengalami fluktuasi yang sejalan dengan laju inflasi Provinsi Jawa Barat. Laju inflasi Kota Bogor mengalami penurunan hingga tahun 2021. Kemudian laju inflasi meningkat cukup tinggi pada tahun 2022. Kenaikan inflasi pada tahun 2022 ini disebabkan oleh utamanya kenaikan harga BBM dan harga kebutuhan di pasar. seiring dengan pemulihan ekonomi pascapandemi. Pemerintah Kota Bogor telah berupaya mengatasi penyebab inflasi tersebut, di antaranya menyelenggarakan operasi pasar terbuka, inspeksi mendadak atas harga barang komoditas, penggalakan gerakan menanam tanaman pangan tertentu, subsidi transportasi, dan kerja sama dengan daerah lain untuk penyediaan komoditas dengan harga murah.

Indeks Gini, atau yang disebut juga Rasio Gini atau Koefisien Gini, adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Rasio Gini memiliki indeks yang memiliki rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 berarti tidak ada kesenjangan ekonomi, atau perekonomian merata pada daerah tersebut. Sedangkan nilai 1 berarti menunjukkan nilai kesenjangan maksimal. Berikut tabel patokan nilai Rasio Gini.

Kota Bogor menunjukkan peningkatan kesenjangan ekonomi. Pada tahun 2019, ketimpangan Kota Bogor masih terbilang rendah. Selanjutnya pada tahun 2020 hingga 2022, ketimpangan Kota Bogor terbilang sedang. Meningkatnya ketimpangan ini sejalan dengan akibat dari pandemi COVID-19 di tahun 2020 dan 2021, di mana melemahnya kegiatan ekonomi berpengaruh pada kemampuan penduduk Kota Bogor dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian Rasio Gini mengalami sedikit penurunan di tahun 2022 dengan selisih 0,011 poin. Ini menunjukkan adanya penurunan kesenjangan ekonomi. Namun karena 0,430 masih tergolong ketimpangan sedang, maka Kota Bogor masih memiliki permasalahan yang perlu dipecahkan terkait kesenjangan ekonomi. Walaupun PDRB meningkat setiap tahun, kesejahteraan ekonomi secara umum belum tercapai yang disertai dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor pada tahun 2020-2022 yang berada di atas 10%. Hal ini menandakan perlunya strategi penanggulangan ketimpangan yang menyasar pada aspek ketenagakerjaan dan produktivitas sektor informal. Tren peningkatan Rasio Gini Kota Bogor mengikuti tren Provinsi Jawa Barat. Kedua wilayah ini sama-sama menunjukkan pertambahan kesenjangan ekonomi. Selain itu, baik Kota Bogor maupun Provinsi Jawa Barat belum bisa menyamai tingkat kesenjangan Nasional yang terbilang lebih rendah.

Kemiskinan didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemiskinan absolut yang mana pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada satu garis yang disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini terdiri dari 2 komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Jumlah penduduk miskin di Kota Bogor mengalami tren peningkatan. Walaupun pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0,14%, jumlah penduduk miskin Kota Bogor yang sebesar 79,15 ribu jiwa masih terbilang tinggi. Dengan naiknya PDRB, Indeks Gini, dan jumlah penduduk miskin Kota Bogor, menandakan perlunya upaya khusus untuk menekan angka kemiskinan melalui redistribusi pendapatan.

Apabila ditinjau dari PDRB dengan pendekatan pengeluaran, maka investasi menjadi aspek penting untuk menciptakan lapangan kerja, yang nantinya akan dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan. Namun, karakteristik Kota Bogor menyebabkannya sulit untuk menumpukan pertumbuhan ekonominya dari sisi investasi untuk mengembangkan industri-industri besar padat modal. Berbeda dengan daerah-daerah tetangga seperti Kabupaten Bogor, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi, Kota Bogor memiliki keterbatasan dan kompatibilitas ruang untuk mengembangkan kawasan industri yang dimaksud.

Ini dapat dilihat dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebagai komponen PDRB pendekatan pengeluaran. Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yaitu dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2022 Kota Bogor menempati urutan terakhir di antara

daerah Bodetabek dalam PMTB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 17.441,68 miliar. Sedangkan PMTB Kabupaten Bogor sebesar Rp 56.272,49 miliar, Kota Depok Rp 43.144,95 miliar, Kota Bekasi Rp 37.125,99 miliar, dan tertinggi adalah Kabupaten Bekasi dengan Rp 79.217,23 miliar.

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi Rumah Tangga (RT) per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran per kapita di Kota Bogor cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2022 sebesar Rp. 233,000. Pendekatan pengeluaran rumah tangga ini yang dijadikan sebagai alat ukur kesejahteraan masyarakat dalam Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) oleh BPS, mengingat sulitnya memperoleh data pendapatan yang akurat. Penurunan terjadi dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar Rp. 261,000 sedangkan dari tahun 2020 ke tahun 2021 naik sebesar Rp. 152,000. Kenaikan pada tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar Rp 342,000.

Capaian pengeluaran per kapita rumah tangga Jawa Barat maupun nasional mengalami tren fluktuatif selama periode 4 (empat) tahun (2019-2022). Berdasarkan grafik diatas, data menunjukkan capaian pengeluaran per kapita Kota Bogor lebih tinggi dibandingkan provinsi dan nasional. Pada tahun 2022, capaian pengeluaran per kapita Jawa Barat sebesar Rp 11.277 ribu, sedangkan untuk Kota Bogor pengeluaran per kapita sebesar Rp 12,058 ribu. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut menunjukkan konsumsi per kapita di Kota Bogor lebih tinggi dibandingkan rata-rata konsumsi Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan PDRB Kota Bogor yang meningkat setiap tahun, meningkatnya PDRB dan pengeluaran per kapita berarti menunjukkan kemampuan daya beli yang cukup tinggi di Kota Bogor, sehingga secara

tidak langsung memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Pengeluaran per kapita dibedakan atas dua jenis pengeluaran yaitu pengeluaran pangan dan non pangan. Pengeluaran non pangan per kapita Kota Bogor setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan teori Hukum *Engel/Engel Law* yaitu semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kota Bogor mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Kenaikan terjadi di 2021 sebesar 0,16% dan menurun kembali di tahun berikutnya menjadi 58,06%. Akan tetapi jika melihat tren pengeluaran konsumsi non pangan dari tahun 2019 menunjukkan kenaikan. Dari data tabel di atas, menunjukkan pengeluaran konsumsi non pangan menjadi sektor pengeluaran yang lebih tinggi di Kota Bogor dibandingkan konsumsi pangan. Pengeluaran non pangan terbesar dikeluarkan pada komoditi perumahan dan fasilitas perumahan yaitu sebesar 37,05%, disusul aneka barang dan jasa tercatat sebesar 17,99%, dan terkecil pada komoditas keperluan pesta dan upacara dengan tercatat 0,83% yang berarti pengeluaran masyarakat cenderung lebih besar pada komoditi perumahan dan fasilitas perumahan.

V. ANALISIS SITUASI KONSUMSI PANGAN PENDUDUK

A. Pola Konsumsi Pangan Penduduk

Berdasarkan data Susenas Tahun 2023 secara kuantitas konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor sudah cukup tinggi. Sebagaimana disajikan pada Tabel V.A.1 data Susenas menunjukkan bahwa kelompok pangan yang dikonsumsi penduduk di Kota Bogor dalam jumlah yang relatif banyak dalam satuan berat secara berturut-turut adalah kelompok padi-padian, pangan hewani, serta sayur & buah. Sementara itu, kelompok pangan umbi-umbian, minyak dan lemak, kacang-kacangan, dan gula dikonsumsi dalam jumlah yang relatif sedikit. Buah/biji berminyak merupakan kelompok pangan yang dikonsumsi dalam jumlah yang paling sedikit.

Tabel V.A.1. Situasi Pola Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kota Bogor Tahun 2023.

No	Kelompok Pangan	Kontribusi Kelompok		Kontribusi Pangan Strategis	
		gram/hari	kg/tahun	Jenis Pangan	kg/tahun
1.	Padi-padian	300.9	109.8	Beras	88.3
2.	Umbi-umbian	38.7	14.1	Singkong	8.0
3.	Pangan Hewani	122.6	44.7	Daging Unggas	11.6
4.	Minyak dan Lemak	30.1	11.0	Minyak Sawit	9.9
5.	Buah/Biji Berminyak	1.0	0.4	Kelapa	0.3
6.	Kacang-kacangan	30.9	11.3	Kacang Kedelai	10.5
7.	Gula	10.8	3.9	Gula Pasir	3.0
8.	Sayur dan Buah	205.1	74.9	Sayur	47.0
9.	Lain-lain	76.9	28.1	Minuman	25.4

Keterangan: *) Data diolah berdasarkan data Susenas Tahun 2023

Data yang lebih terperinci tentang rata-rata konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor pada Tahun 2023 dalam satuan berat per

kelompok dan jenis pangan dapat dilihat pada Lampiran 1. Data yang disajikan pada lampiran tersebut sebagaimana diringkas pada Tabel V.A.1 menunjukkan bahwa berdasarkan jumlahnya dalam satuan berat, jenis-jenis pangan yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk di Kota Bogor pada Tahun 2023 berturut-turut untuk masing-masing kelompok pangan adalah beras (88.3 kg/kapita/tahun) pada kelompok padi-padian, singkong (8.0 kg/kapita/tahun) untuk kelompok umbi-umbian, daging unggas (11.6 kg/kapita/tahun) untuk kelompok pangan hewani, minyak sawit (9.9 kg/kapita/tahun) untuk kelompok minyak dan lemak, kelapa (0.3 kg/kapita/tahun) untuk kelompok buah/biji berminyak, kacang kedelai (10.5 kg/kapita/tahun) untuk kelompok kacang-kacangan, gula pasir (3.0 kg/kapita/tahun) untuk kelompok gula, sayur (47.0 kg/kapita/tahun) untuk kelompok sayur dan buah, dan minuman (25,4 kg/kapita/tahun) untuk kelompok lain-lain.

B. Konsumsi dan Kecukupan Gizi

Ukuran jumlah dalam satuan berat pangan yang dikonsumsi penduduk di Wilayah Kota Bogor sebagaimana dibahas pada sub-bab sebelumnya belum dapat menggambarkan besarnya capaian kontribusi pangan sebagai sumber zat gizi, sehingga tidak dapat menjadi ukuran untuk menganalisis capaian kuantitas maupun kualitas konsumsi pangan penduduk. Oleh itu perlu dianalisis lebih jauh capaian kontribusi gizi, masing-masing kelompok maupun jenis pangan.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel V.B.1 terlihat bahwa kontribusi energi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kota Bogor Tahun 2023 paling banyak diperoleh dari kelompok padi-padian, yaitu sekitar 1,168 kkal/kapita/hari (56,5 %). Kelompok pangan lainnya yang memberikan kontribusi energi yang signifikan adalah pangan hewani sekitar 294 kkal/kapita/hari (14.2 %), minyak & lemak sekitar 270 kkal/kapita/hari (13.0 %) serta sayur & buah sekitar 112 kkal/kapita/hari (5.4 %). Sementara kelompok umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-

kacangan, gula, sayur dan buah serta lain-lain kontribusi energinya relatif kecil.

Tabel V.B.1. Kontribusi Energi Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kota Bogor Tahun 2023.

No	Kelompok Pangan	Kontribusi Kelompok		Kontribusi Pangan Strategis	
		kkal/kap/hari	%	Jenis Pangan	kkal/kap/hari
1.	Padi-padian	1,168	56.5	Beras	865.3
2.	Umbi-umbian	44	2.1	Singkong	27.0
3.	Pangan Hewani	294	14.2	Daging Unggas	97.0
4.	Minyak dan Lemak	270	13.0	Minyak Sawit	244.7
5.	Buah/Biji Berminyak	6	0.3	Kelapa	3.8
6.	Kacang-kacangan	73	3.6	Kacang Kedelai	67.6
7.	Gula	43	2.1	Gula Pasir	33.0
8.	Sayur dan Buah	112	5.4	Sayur	62.1
9.	Lain-lain	59	2.9	Minuman	56.5
Total		2,068	100.0		

Keterangan: *) Data diolah berdasarkan data Susenas Tahun 2023

Secara umum data yang disajikan pada Tabel V.B.1 lebih jauh menunjukkan bahwa hampir sejalan dengan pola konsumsi pangannya, jenis-jenis pangan yang paling banyak menyumbang energi pada konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor pada Tahun 2023 untuk masing-masing kelompok pangan adalah beras (865.3 kkal/kapita/hari) pada kelompok padi-padian, singkong (27.0 kkal/kapita/hari) pada kelompok umbi-umbian, daging unggas (97.0 kkal/kapita/hari) untuk kelompok pangan hewani, minyak sawit (244.7 kkal/kapita/hari) untuk kelompok minyak dan lemak, kelapa (3.2 kkal/kapita/hari) untuk kelompok buah/biji berminyak, kacang kedelai (67.6 kkal/kapita/hari) untuk kelompok kacang-kacangan, gula pasir (33.0 kkal/kapita/hari) untuk kelompok gula, sayur (62.1 kkal/kapita/hari) untuk kelompok sayur dan buah, dan minuman (56.5 kkal/kapita/hari) untuk kelompok lain-lain. Data yang lebih terperinci tentang rata-rata kontribusi energi konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor pada Tahun 2023 per kelompok dan jenis pangan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Data yang disajikan pada Tabel V.B.2 menunjukkan bahwa kontribusi protein konsumsi pangan penduduk di wilayah Kota Bogor Tahun 2023 paling banyak diperoleh dari kelompok padi-padian, yaitu sekitar 26.8 gram/kapita/hari (42.3 %). Kelompok pangan lainnya yang memberikan kontribusi protein yang signifikan adalah pangan hewani sekitar 24,6 gram/kapita/hari (38.8 %), kacang-kacangan sekitar 6.2 gram/kapita/hari (9.9 %) dan sayur & buah sekitar 3.8 gram/kapita/hari (6.0 %). Sementara kelompok umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, gula, dan lain-lain kontribusi Proteinnya relatif kecil.

Tabel V.B.2. Kontribusi Protein Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kota Bogor Tahun 2023.

No	Kelompok Pangan	Kontribusi Kelompok		Kontribusi Pangan Strategis	
		gram/kap/hari	%	Jenis Pangan	gram/kap/hari
1.	Padi-padian	26.8	42.3	Beras	20.4
2.	Umbi-umbian	0.4	0.7	Singkong	0.2
3.	Pangan Hewani	24.6	38.8	Daging Unggas	6.5
4.	Minyak dan Lemak	0.0	0.1	Minyak Lainnya	0.0
5.	Buah/Biji Berminyak	0.1	0.1	Kemiri	0.1
6.	Kacang-kacangan	6.2	9.9	Kacang Kedelai	5.9
7.	Gula	0.2	0.2	Gula Pasir	0.1
8.	Sayur dan Buah	3.8	6.0	Sayur	3.0
9.	Lain-lain	1.2	1.9	Minuman	1.1
Total		63.4	100		

Keterangan: *) Data diolah berdasarkan data Susenas Tahun 2023

Lebih jauh data yang disajikan pada Tabel V.B.2 menunjukkan pula bahwa jenis-jenis pangan yang paling banyak menyumbang protein pada konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor pada Tahun 2023 untuk masing-masing kelompok pangan adalah beras (20.4 gram/kapita/hari) pada kelompok padi-padian, daging unggas (6.5 gram/kapita/hari) untuk kelompok pangan hewani, dan kacang kedelai (5.9 gram/kapita/hari) untuk kelompok kacang-kacangan, dan sayur (3.8 gram/kapita/hari) untuk kelompok sayur & buah. Data yang lebih terperinci tentang rata-rata

kontribusi protein konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor pada Tahun 2023 menurut kelompok dan jenis pangan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Total asupan energi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kota Bogor pada Tahun 2023 mencapai sekitar 2,086 kkal/kapita/hari ebagaimana disajikan pada Tabel V.B.3. Hal ini berarti bahwa secara kuantitas konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kota Bogor sudah memenuhi Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan secara nasional berdasarkan WKNPG Tahun 2018 sebesar 2.100 Kkal/kapita/hari, yang berarti Tingkat Kecukupan Energi (TKE) konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kota Bogor Tahun 2023 hanya mencapai 98.5 %AKE.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel V.B.3 terlihat juga bahwa kecukupan energi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kota Bogor Tahun 2023 paling banyak diperoleh dari kelompok padi-padian, yaitu sekitar 1168 kkal/kapita/hari (55.6 %AKE). Kelompok pangan lainnya yang memberikan kontribusi energi yang signifikan adalah pangan hewani sekitar 294 kkal/kapita/hari (14.0 %AKE) dan minyak & lemak sekitar 270 kkal/kapita/hari (12.8 %AKE). Sementara kelompok umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta lain-lain kontribusi energinya relatif kecil.

Tabel V.B.3. Capaian Kecukupan Energi dan Protein Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kota Bogor Tahun 2023.

No	Kelompok Pangan	Energi		Protein	
		kkal/kap/hari	%AKE	gr/kap/hari	%AKP
1.	Padi-padian	1,168	55.6	26.8	47.0
2.	Umbi-umbian	44	2.1	0.4	0.8
3.	Pangan Hewani	294	14.0	24.6	43.2
4.	Minyak dan Lemak	270	12.8	0.0	0.1
5.	Buah/Biji Berminyak	6	0.3	0.1	0.2
6.	Kacang-kacangan	73	3.5	6.2	11.0
7.	Gula	43	2.0	0.2	0.3
8.	Sayur dan Buah	112	5.3	3.8	6.6
9.	Lain-lain	59	2.8	1.2	2.1
Total		2,068	98.5	63.4	111.2

Keterangan: *) Data diolah berdasarkan data Susenas Tahun 2023

**) Standar AKE sebesar 2100 kkal/Kap/Hari dan AKP sebesar 57 gr/kap/hari

Berdasarkan hasil analisis data Susenas sebagaimana disajikan pada Tabel V.B.3, total asupan protein konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor pada Tahun 2023 mencapai 63.4 gram/kapita/hari. Hal ini berarti bahwa secara kuantitas konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kota Bogor sudah memenuhi Angka Kecukupan Protein (AKP) yang dianjurkan secara nasional berdasarkan WKNPG Tahun 2018 sebesar 57 gram/kapita/hari, yang berarti Tingkat Kecukupan Protein (TKP) konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor Tahun 2023 mencapai 111.2 %AKP.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel V.B.3 terlihat juga bahwa kontribusi protein konsumsi pangan penduduk di wilayah Kota Bogor Tahun 2023 paling banyak diperoleh dari kelompok padi-padian, yaitu sekitar 26.8 gram/kapita/hari (47.0 %AKP) dan pangan hewani sekitar 24.6 gram/kapita/hari (43.2 %AKP). Sementara kelompok kacang-kacangan sebagai sumber protein nabati hanya menyumbang sekitar 6.2 gram/kapita/hari (11.0 %AKP).

C. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Capaian kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan di suatu wilayah tidak cukup hanya didasarkan pada hasil analisis capaian konsumsi pangan yang ditunjukkan oleh terpenuhi atau tidaknya kuantitas kecukupan gizi konsumsi pangan penduduk. Analisis lebih lanjut perlu dilakukan terhadap kualitas kecukupan gizi, khususnya dinilai dari aspek komposisi atau keragaman dan mutu gizi konsumsi pangan penduduk. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah analisis kualitas konsumsi pangan berdasarkan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH) yang didasarkan pada kontribusi kecukupan konsumsi energi masing-masing kelompok pangan.

Tabel V.C.1. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kota Bogor Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Kapita/Hari		Standar PPH**)		Capaian	
		kkal	%AKE*)	Bobot	Skor	Skor AKE	Skor PPH
1.	Padi-padian	1,168	55.6	0.5	25.0	27.8	25.0
2.	Umbi-umbian	44	2.1	0.5	2.5	1.0	1.0
3.	Pangan Hewani	294	14.0	2.0	24.0	28.0	24.0
4.	Minyak dan Lemak	270	12.8	0.5	5.0	6.4	5.0
5.	Buah/Biji Berminyak	6	0.3	0.5	1.0	0.1	0.1
6.	Kacang-kacangan	73	3.5	2.0	10.0	7.0	7.0
7.	Gula	43	2.0	0.5	2.5	1.0	1.0
8.	Sayur dan Buah	112	5.3	5.0	30.0	26.6	26.6
9.	Lain-lain	59	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
		2,068	98.5		100.0		89.8

Keterangan: *) Data diolah berdasarkan data Susenas Tahun 2023

**) Dihitung berdasarkan standar AKE sebesar 2100 kkal/Kap/Hari dan standar PPH Nasional

Data yang disajikan pada Tabel V.C.1 menunjukkan bahwa berdasarkan data Susenas Tahun 2023, skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan penduduk di wilayah Kota Bogor baru mencapai 89.8 jika didasarkan pada AKE sebesar 2.100 Kkal/kapita/hari. Dengan

demikian, secara umum kualitas konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kota Bogor Tahun 2023 masih belum mencapai pola konsumsi pangan yang ideal berdasarkan Standar PPH Ideal Nasional dengan skor PPH 100.

Secara umum, belum optimalnya kualitas konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kota Bogor tersebut diakibatkan oleh belum berimbangnya kontribusi energi untuk masing-masing kelompok pangan berdasarkan standar Pola Pangan Harapan. Sebagian besar kelompok pangan memiliki kontribusi energi konsumsi pangan yang masih defisit dibandingkan kecukupan energi untuk masing-masing kelompoknya, kecuali untuk kelompok padi-padian, pangan hewani serta minyak dan lemak. Hal tersebut menyebabkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan penduduk di wilayah Kota Bogor untuk hamper semua kelompok pangan masih belum sesuai dengan pola konsumsi pangan yang sesuai dengan standar PPH ideal.

D. Gap Situasi Konsumsi Pangan

Masih belum berimbangnya kontribusi energi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kota Bogor sebagaimana telah dibahas pada sub-bab sebelumnya berdampak pada rendahnya kualitas konsumsi pangan penduduk di wilayah Kota Bogor. Gap analisis situasi konsumsi pangan aktual dengan standar ideal cukup memadai sebagai dasar analisis sasaran konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kota Bogor.

Secara umum konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kota Bogor sampai Tahun 2023 dapat dikatakan masih rendah kualitasnya. Jika mengacu pada standar Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2100 kkal/kapita/hari, maka skor PPH konsumsi pangan penduduk di wilayah Kota Bogor Tahun 2023 masih kekurangan sebanyak 10,2 poin dari skor PPH Ideal sebesar 100 sebagaimana data yang disajikan pada Tabel V.D.1.

Tabel V.D.1. Gap Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kota Bogor Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Per Kapita/Hari		Standar Ideal**)		Gap	
		%AKE*)	Skor PPH	%AKE	Skor PPH	%AKE	Skor PPH
1.	Padi-padian	55.6	25.0	50.0	25.0	5.6	0.0
2.	Umbi-umbian	2.1	1.0	6.0	2.5	-3.9	-1.5
3.	Pangan Hewani	14.0	24.0	12.0	24.0	2.0	0.0
4.	Minyak dan Lemak	12.8	5.0	10.0	5.0	2.8	0.0
5.	Buah/Biji Berminyak	0.3	0.1	3.0	1.0	-2.7	-0.9
6.	Kacang-kacangan	3.5	7.0	5.0	10.0	-1.5	-3.0
7.	Gula	2.0	1.0	5.0	2.5	-3.0	-1.5
8.	Sayur dan Buah	5.3	26.6	6.0	30.0	-0.7	-3.4
9.	Lain-lain	2.8	0.0	3.0	0.0	-0.2	0.0
		98.5	89.8	100.0	100.0	-1.5	-10.2

Keterangan: *) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2100 kkal/kapita/hari

**) Standar Perhitungan PPH Ideal Nasional

Sebagian besar kelompok pangan memiliki kontribusi energi konsumsi pangan yang masih defisit dibandingkan kecukupan energi untuk masing-masing kelompoknya, kecuali untuk kelompok padi-padian serta minyak dan lemak. Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel V.D.1 secara umum dapat disimpulkan bahwa sejalan dengan pola konsumsinya, maka kontribusi energi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kota Bogor untuk semua kelompok pangan masih belum sesuai dengan pola konsumsi pangan yang sesuai dengan standar PPH ideal.

Lebih jauh data yang disajikan pada Tabel V.D.2 menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok pangan memiliki kontribusi energi konsumsi pangan yang masih defisit dibandingkan kecukupan energi untuk masing-masing kelompoknya, kecuali untuk kelompok padi-padian,

pangan hewani, minyak dan lemak serta kelompok lain-lain. Hal tersebut secara atomatis berdampak pada belum bisa tercapainya skor PPH yang ideal untuk masing-masing kelompok pangan tersebut.

Tabel V.D.2. Gap Kontribusi Kecukupan Energi Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kota Bogor Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Per Kapita/Hari		Standar Ideal*)		Gap	
		Energi (kkal)	%AKE	Energi (kkal)	%AKE	Energi (kkal)	%AKE
1.	Padi-padian	1,168	55.6	1,050	50.0	118	5.6
2.	Umbi-umbian	44	2.1	126	6.0	-82	-3.9
3.	Pangan Hewani	294	14.0	252	12.0	42	2.0
4.	Minyak dan Lemak	270	12.8	210	10.0	60	2.8
5.	Buah/Biji Berminyak	6	0.3	63	3.0	-57	-2.7
6.	Kacang-kacangan	73	3.5	105	5.0	-32	-1.5
7.	Gula	43	2.0	105	5.0	-62	-3.0
8.	Sayur dan Buah	112	5.3	126	6.0	-14	-0.7
9.	Lain-lain	59	2.8	63	3.0	-4	-0.2
		2,068	98.5	2,100	100.0	-32	-1.5

Keterangan: *) Angka Kecukupan Energi (AKE) 2100 kkal/kapita/hari

Sejalan dengan pola kontribusi energinya, maka berat pangan yang dikonsumsi oleh penduduk di wilayah Kota Bogor untuk semua kelompok pangan masih belum sesuai dengan pola konsumsi pangan sesuai standar PPH ideal. Data yang disajikan pada Tabel V.D.3 tersebut menyajikan perbandingan atau gap antara estimasi rata-rata berat konsumsi per kelompok pangan penduduk di wilayah Kota Bogor Tahun 2023 dengan estimasi ideal berat konsumsi pangan masing-masing kelompok pangan berdasarkan standar PPH Nasional dengan AKE sebesar 2100 kkal/kapita/hari.

Tabel V.D.3. Gap Kuantitas Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kota Bogor Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Per Kapita		Estimasi Ideal Per Kapita		Gap	
		gr/hari	kg/tahun	gr/hari	kg/tahun	gr/hari	kg/tahun
1.	Padi-padian	301	109.8	279	101.9	21.8	8.0
2.	Umbi-umbian	39	14.1	91	33.0	-51.8	-18.9
3.	Pangan Hewani	123	44.7	110	40.2	12.5	4.6
4.	Minyak dan Lemak	30	11.0	25	9.2	4.8	1.7
5.	Buah/Biji Berminyak	1	0.4	8	3.0	-7.3	-2.7
6.	Kacang-kacangan	31	11.3	40	14.7	-9.4	-3.4
7.	Gula	11	3.9	22	8.1	-11.4	-4.2
8.	Sayur dan Buah	205	74.9	224	81.7	-18.8	-6.9
9.	Lain-lain	77	28.1	81	29.4	-3.6	-1.3

Keterangan: Estimasi berdasarkan konversi konsumsi energi masing-masing kelompok pangan menjadi berat konsumsi pangan dalam gram/kapita/hari dengan standar AKE sebesar 2100 kkal/kapita/hari

Mengacu pada data hasil harmonisasi analisis PPH berdasarkan data Susenas Tahun 2023, secara umum konsumsi pangan penduduk per kapita di Wilayah Kota Bogor mengalami kelebihan padi-padian sebanyak 21.8 gram/hari atau 8.0 kg/tahun, pangan hewani sekitar 12.5 gram/kapita/hari atau 4.6 kg/kapita/tahun, serta minyak dan lemak sekitar 4.8 gram/hari atau 1.7 kg/tahun. Sementara itu konsumsi pangan penduduk per kapita untuk kelompok umbi-umbian mengalami defisit yang sangat signifikan, yaitu masing-masing sekitar 51.8 gram/hari atau 18.9 kg/tahun. Demikian pula untuk pangan buah/biji berminyak yang masih mengalami defisit sekitar 7.3 gram/hari atau 2.7 kg/tahun, kacang-kacangan mengalami defisit sekitar 9.4 gram/hari atau 3.4 kg/tahun, gula masih mengalami defisit sekitar 11.4 gram/hari atau 7,0 kg/tahun, sayur dan buah mengalami defisit sekitar 18.8 gram/hari atau 6.9 kg/tahun. Sementara untuk kelompok pangan lain-lain juga masih mengalami defisit sekitar 3.6 gram/hari atau 1.3 kg/kapita/tahun.

VI. ANALISIS KEBUTUHAN KONSUMSI PANGAN

A. Kebutuhan Konsumsi Pangan Penduduk

Estimasi kebutuhan konsumsi pangan wilayah untuk mencapai sasaran skor PPH pada periode waktu tertentu dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menentukan strategi pemenuhan kebutuhan pangan wilayah. Selain informasi tentang kelompok jenis pangan apa saja yang masih perlu ditingkatkan, hasil analisis tersebut juga dapat menjadi acuan estimasi tingkat pertumbuhan yang diperlukan agar target tersebut dapat dicapai.

Tabel VI.A.1. Estimasi Kebutuhan Konsumsi Pangan Per Kapita Penduduk di Kota Bogor Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	Capaian Per Kapita		Ideal Per Kapita		Gap Per Tahun		
		gr/hari	kg/tahun	gr/hari	kg/tahun	gr/hari	kg/tahun	%
1.	Padi-padian	331.0	120.8	297.4	108.6	33.6	12.2	11.3
2.	Umbi-umbian	42.6	15.5	122.3	44.6	-79.7	-29.1	-65.2
3.	Pangan Hewani	134.8	49.2	115.6	42.2	19.2	7.0	16.6
4.	Minyak dan Lemak	33.1	12.1	25.8	9.4	7.3	2.7	28.4
5.	Buah/Biji Berminyak	1.1	0.4	12.3	4.5	-11.2	-4.1	-91.1
6.	Kacang-kacangan	33.9	12.4	48.5	17.7	-14.6	-5.3	-30.1
7.	Gula	11.9	4.3	29.4	10.7	-17.5	-6.4	-59.5
8.	Sayur dan Buah	225.6	82.4	254.5	92.9	-28.9	-10.5	-11.4
9.	Lain-lain	84.6	30.9	90.1	32.9	-5.5	-2.0	-6.1

Keterangan: Estimasi kebutuhan pangan pada setiap kelompok didasarkan pada rata-rata perkapita konsumsi pangan penduduk ditambah 10%

Estimasi kebutuhan konsumsi pangan ideal per jenis pangan didasarkan pada kontribusi energi dalam persen suatu jenis pangan pada kelompok pangan masing-masing dikalikan jumlah energi ideal untuk tiap kelompok pangan dengan asumsi kontribusi antar jenis pangan dalam suatu kelompok tidak berubah. Estimasi berat pangan ideal untuk suatu jenis pangan diperoleh dari hasil konversi estimasi jumlah energi ideal yang berasal dari suatu jenis pangan kedalam berat pangan jenis pangan

tersebut. Jumlah kebutuhan konsumsi pangan penduduk tersebut didasarkan pada angka hasil proyeksi konsumsi pangan berdasarkan sasaran skor PPH) ditambah 10 %.

Hasil analisis terhadap data konsumsi pangan penduduk di wilayah Kota Bogor berdasarkan data Susenas Tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor belum optimal. Sebagaimana disajikan pada Tabel VI.A.1 kelompok pangan yang pemenuhan kebutuhan konsumsinya telah melebihi idealnya berdasarkan Pola Pangan Harapan hanyalah padi-padian (120.8 kg/kapita), pangan hewani (49.2 kg/kapita), dan minyak & lemak (12.1 kg/kapita) per tahun. Sementara kelompok umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, sayur dan buah, dan lain-lain belum memenuhi estimasi kebutuhan pangan idealnya.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel VI.A.1 untuk mencapai estimasi ideal kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor pada Tahun 2023 masih diperlukan tambahan pangan kelompok umbi-umbian (29.1 kg/kapita), buah/biji berminyak (4.1 kg/kapita), kacang-kacangan (5.3 kg/kapita), gula (6.4 kg/kapita), sayur dan buah (10.5 kg/kapita) serta kelompok lain-lain (1,56 kg/kapita) per tahun. Data lebih detail tentang gap konsumsi pangan penduduk di wilayah Kota Bogor pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 4.

B. Kebutuhan Konsumsi Pangan Wilayah

Estimasi kebutuhan konsumsi pangan wilayah tahun di suatu wilayah tertentu dapat dihitung berdasarkan perkalian antara rata-rata kebutuhan konsumsi pangan (kg/kapita/tahun) dengan jumlah penduduk tahun yang sama. Oleh karena itu, realisasi pemenuhan kebutuhan pangan wilayah di Kota Bogor Tahun 2023 menunjukkan pola yang sama dengan capaian pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk perkapita pada tahun yang sama. Berdasarkan data Tabel VI.B.1, kelompok pangan yang

realisasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan wilayahnya telah melebihi estimasi idealnya berdasarkan Pola Pangan Harapan hanyalah kelompok padi-padian (129.4 ribu ton), pangan hewani (52.7 ribu ton), dan minyak dan lemak (12.9 ribu ton) per tahun.

Tabel VI.B.1. Estimasi Kebutuhan Konsumsi Pangan Penduduk Per Tahun di Kota Bogor Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	Capaian Per Tahun		Ideal Per Tahun		Gap Per Tahun		
		kg/kapita	Ribu Ton	kg/kapita	Ribu Ton	kg/kapita	Ribu Ton	%
1.	Padi-padian	120.8	129.4	108.6	116.2	12.2	13.1	11.3
2.	Umbi-umbian	15.5	16.6	44.6	47.8	-29.1	-31.1	-65.2
3.	Pangan Hewani	49.2	52.7	42.2	45.2	7.0	7.5	16.6
4.	Minyak dan Lemak	12.1	12.9	9.4	10.1	2.7	2.9	28.4
5.	Buah/Biji Berminyak	0.4	0.4	4.5	4.8	-4.1	-4.4	-91.1
6.	Kacang-kacangan	12.4	13.3	17.7	19.0	-5.3	-5.7	-30.1
7.	Gula	4.3	4.6	10.7	11.5	-6.4	-6.8	-59.5
8.	Sayur dan Buah	82.4	88.2	92.9	99.5	-10.5	-11.3	-11.4
9.	Lain-lain	30.9	33.1	32.9	35.2	-2.0	-2.1	-6.1

*Keterangan: *) Estimasi berdasarkan perkalian estimasi kebutuhan konsumsi pangan (kg/kapita/hari) dengan asumsi jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 1,070,719 jiwa*

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel VI.B.1 lebih jauh terlihat bahwa untuk dapat mencapai estimasi ideal total kebutuhan konsumsi pangan wilayah di Kota Bogor pada Tahun 2023 masih diperlukan tambahan pangan kelompok umbi-umbian (31.1 ribu ton), buah/biji berminyak (4.4 ribu ton), kacang-kacangan (5.7 ribu ton), gula (6.8 ribu ton), sayur dan buah (11.3 ribu ton) dan kelompok pangan lain-lain (2.1 ribu ton) per tahun. Data lebih detail tentang estimasi kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 4.

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara umum berdasarkan volumenya konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor Tahun 2023 masih belum optimal. Berdasarkan hasil analisis situasi konsumsi pangan penduduk di wilayah Kota Bogor menurut data Susenas tahun 2023 terlihat bahwa sebagian besar kelompok pangan kecuali pada kelompok kecuali pada kelompok padi-padian, pangan hewani dan minyak & lemak.

Total asupan energi konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor hanya mencapai 2,068 kkal/kapita/hari (98.5 %AKE). Adapun total asupan protein konsumsi pangan penduduk di wilayah Kota Bogor pada telah mencapai 63.4 gram/kapita/hari (111.2 %AKP). Hal ini berarti bahwa secara kuantitas konsumsi pangan penduduk di Wilayah Kota Bogor masih belum optimal. Demikian pula secara kualitas, konsumsi pangan penduduk Kota Bogor masih belum optimal. Pada tahun 2023 skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan penduduk Kota Bogor baru mencapai sekitar 89.8 yang berarti masih jauh dari skor PPH ideal nasional sebesar 100.

Pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor belum terealisasi seusuai harapan. Kelompok pangan yang pemenuhan kebutuhan konsumsinya melebihi idealnya berdasarkan Pola Pangan Harapan hanyalah padi-padian (120.0 kg/kapita), pangan hewani (49.2 kg/kapita), dan minyak & lemak (12.1 kg/kapita) per tahun. Sementara kelompok umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, sayur dan buah, dan lain-lain belum memenuhi estimasi idealnya. Untuk mencapai estimasi ideal kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor pada Tahun 2023 masih diperlukan tambahan pangan kelompok umbi-umbian (29.1 kg/kapita), buah/biji berminyak (4.1 kg/kapita), kacang-kacangan (5.3 kg/kapita), gula (6.4 kg/kapita), sayur

dan buah (10.5 kg/kapita) serta kelompok lain-lain (1,56 kg/kapita) per tahun.

Realisasi pemenuhan kebutuhan pangan wilayah di Kota Bogor Tahun 2023 menunjukkan pola yang sama dengan capaian pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk perkapita pada tahun yang sama. Kelompok pangan yang realisasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan wilayahnya telah melebihi estimasi idealnya berdasarkan Pola Pangan Harapan hanyalah kelompok padi-padian (129.4 ribu ton), pangan hewani (52.7 ribu ton), dan minyak dan lemak (12.9 ribu ton) per tahun. Untuk dapat mencapai estimasi ideal kebutuhan konsumsi pangan penduduk di wilayah Kota Bogor pada masih diperlukan tambahan pangan kelompok umbi-umbian (31.1 ribu ton), buah/biji berminyak (4.4 ribu ton), kacang-kacangan (5.7 ribu ton), gula (6.8 ribu ton), sayur dan buah (11.3 ribu ton) dan kelompok pangan lain-lain (2.1 ribu ton) per tahun.

B. Saran

Hasil kajian Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Penduduk Kota Bogor berdasarkan data Susenas tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi capaian kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan, khususnya dalam upaya perbaikan pola konsumsi dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk di Kota Bogor. Dengan dukungan data dan informasi dari hasil kajian ini diharapkan sinergitas kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan ketahanan pangan, khususnya di bidang konsumsi pangan, di wilayah Kota Bogor dapat lebih dioptimalkan. Informasi dasar tentang situasi dan estimasi kebutuhan konsumsi pangan penduduk diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholder terkait pembangunan ketahanan pangan di Kota Bogor pada setiap tahapan dan proses pembangunan baik tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan demikian program pembangunan ketahanan pangan, khususnya dalam

rangka perbaikan konsumsi pangan penduduk di wilayah Kota Bogor dapat terlaksana secara lebih effektif & effisien.

Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mensosialisasikan dan mengadvokasikannya kepada berbagai stakeholder terkait. Berbagai strategi & program pembangunan bidang ketahanan pangan perlu terus ditingkatkan dengan dukungan program perbaikan ekonomi & kesejahteraan masyarakat. Penguatan akses pangan penduduk melalui upaya peningkatan daya beli pangan masyarakat yang diimbangi dengan penguatan kesadaran tentang pentingnya makanan bergizi, beragam dan berimbang menjadi strategi & program pokok ketahanan pangan di wilayah Kota Bogor.

Hasil analisis estimasi kebutuhan konsumsi pangan dalam kajian ini hanya mempertimbangkan kebutuhan pangan untuk konsumsi penduduk di tingkat rumah tangga. Oleh karena itu, dalam menghitung kebutuhan konsumsi pangan wilayah secara keseluruhan perlu ditambah lagi dengan estimasi kebutuhan konsumsi pangan penduduk di luar rumah tangga, khususnya di rumah sakit, hotel dan restoran, lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Selain itu, untuk mengestimasi lebih jauh tentang total kebutuhan pangan wilayah harus pula mempertimbangkan kebutuhan pangan wilayah untuk non konsumsi penduduk, seperti : industri, energi alternatif, dan lain-lain. Dengan demikian, analisis tentang kebutuhan pangan akan lebih komprehensif, sehingga dapat mencakup kebutuhan pangan untuk konsumsi penduduk maupun untuk kebutuhan lainnya.

Agar hasil kajian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dasar pembangunan ketahanan pangan di wilayah Kota Bogor, maka perlu dilakukan analisis lebih komprehensif paling tidak mencakup data satu periode RPJMD Kota Bogor yang telah lalu. Dengan demikian dapat dilakukan analisis tren pertumbuhan pada setiap variabel atau indikator pokok situasi konsumsi pangan. Hasil analisis tren pertumbuhan tersebut

merupakan salah satu faktor utama yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam analisis sasaran konsumi dan estimasi kebutuhan konsumsi pangan periode RPJM berikutnya.

Selain itu, lebih baik lagi jika dapat disukung dengan kajian mendalam tentang disparitas dan preferensi konsumsi pangan masyarakat untuk menggali berbagai faktor determinan yang berperan dalam membentuk pola konsumsi pangan penduduk di wilayah Kota Bogor. Dengan demikian, diharapkan dapat disusun berbagai strategi dan alternatif program ketahanan pangan yang effektif dan effisien pada berbagai tingkat sasaran mulai dari tingkat individu, rumah tangga dan lembaga maupun wilayah.

Hasil analisis situasi konsumsi dan estimasi kebutuhan konsumsi pangan tersebut perlu disinergiskan pula dengan hasil analisis ketersediaan pangan wilayah. Berdasarkan hasil analisis awal tentang capaian pola konsumsi dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan serta ketersediaan pangan wilayah tersebut, maka dapat dilakukan kajian lebih lanjut tentang analisis penyediaan pangan wilayah. Pada analisis tahap ini fokus kajian sudah mensinergiskan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan dengan potensi dan daya dukung wilayah, baik potensi agroekologi maupun sosial ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Bogor. 2024. *Kota Bogor Dalam Angka Tahun 2024*. Badan Pusat Statistik Kota Bogor, Bogor.

Badan Pusat Statistik Kota Bogor. 2024. *Statistik Daerah Kota Bogor Tahun 2024*. Badan Pusat Statistik Kota Bogor, Bogor.

Badan Pusat Statistik Kota Bogor. 2024. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota 2024*. Badan Pusat Statistik Kota Bogor, Bogor.

Badan Ketahanan Pangan. 2015. *Panduan Penghitungan Pola Pangan Harapan*. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Jakarta.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor. 2024. *Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Tahun 2023*. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, Bogor.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pola Konsumsi Pangan Penduduk di Kota Bogor Menurut Kelompok dan Jenis Pangan Tahun 2023

Kelompok dan Jenis Pangan	Berat Konsumsi Per Kapita		
	Gram/Hari	Kg/Tahun	%
1. Padi-Padian			
Beras	241.8	88.3	80.4
Jagung	1.9	0.7	0.6
Terigu	57.3	20.9	19.0
Subtotal	300.9	109.8	100.0
2. Umbi-umbian			
Singkong	21.9	8.0	56.7
Ubi Jalar	6.2	2.3	16.1
Sagu	9.2	3.3	23.7
Kentang	1.0	0.4	2.6
Umbi Lainnya	0.4	0.1	0.9
Subtotal	38.7	14.1	100.0
3. Pangan Hewani			
Daging Ruminansia	11.5	4.2	9.3
Daging Unggas	31.9	11.6	26.0
Telur	25.8	9.4	21.0
Susu	10.6	3.9	8.7
Ikan	42.8	15.6	34.9
Subtotal	122.6	44.7	100.0
4. Minyak dan Lemak			
Minyak Kelapa	1.5	0.5	4.9
Minyak Lainnya	27.1	9.9	90.2
Margarin	1.5	0.5	4.9
Subtotal	30.1	11.0	100.0
5. Buah/Biji Berminyak			
Kelapa	0.7	0.3	72.2
Kemiri	0.3	0.1	27.8
Subtotal	1.0	0.4	100.0
6. Kacang-kacangan			
Kacang Kedelai	28.8	10.5	93.2
Kacang Tanah	0.6	0.2	1.8
Kacang Hijau	1.1	0.4	3.5
Kacang lain	0.4	0.2	1.4
Subtotal	30.9	11.3	100.0
7. Gula			
Gula Pasir	8.3	3.0	76.6
Gula Merah	2.5	0.9	23.4
Subtotal	10.8	3.9	100.0
8. Sayur dan Buah			
Sayur	128.7	47.0	62.7
Buah	76.5	27.9	37.3
Subtotal	205.1	74.9	100.0
9. Lain-lain			
Minuman	69.7	25.4	90.6
Bumbu	7.2	2.6	9.4
Subtotal	76.9	28.1	100.0

Lampiran 2. Kontribusi Gizi Konsumsi Pangan Penduduk di Kota Bogor Menurut Kelompok dan Jenis Pangan Tahun 2023

Kelompok dan Jenis Pangan	Kontribusi Energi		Kontribusi Protein	
	Kkal/Kap/Hari	%	Gram/Kap/Hari	%
1. Padi-Padian				
Beras	865.3	74.1	20.4	76.0
Jagung	2.6	0.2	0.1	0.3
Terigu	300.6	25.7	6.4	23.7
Subtotal	1,168.5	100.0	26.8	100.0
2. Umbi-umbian				
Singkong	27.0	61.5	0.2	44.4
Ubi Jalar	8.3	19.0	0.1	16.6
Sagu	4.8	10.9	0.2	36.4
Kentang	3.4	7.7	0.0	1.3
Umbi Lainnya	0.4	0.9	0.0	1.3
Subtotal	43.9	100.0	0.4	100.0
3. Pangan Hewani				
Daging Ruminansia	56.1	19.1	3.7	15.1
Daging Unggas	97.0	33.0	6.5	26.5
Telur	35.4	12.1	2.8	11.6
Susu	43.5	14.8	1.7	7.0
Ikan	61.8	21.0	9.8	39.8
Subtotal	293.9	100.0	24.6	100.0
4. Minyak dan Lemak				
Minyak Kelapa	12.9	4.8	0.0	37.2
Minyak Lainnya	244.7	90.7	-	-
Margarin	12.2	4.5	0.0	62.8
Subtotal	269.7	100.0	0.0	100.0
5. Buah/Biji Berminyak				
Kelapa	3.8	68.6	0.0	40.9
Kemiri	1.8	31.4	0.1	59.1
Subtotal	5.6	100.0	0.1	100.0
6. Kacang-kacangan				
Kacang Kedelai	67.6	92.1	5.9	93.8
Kacang Tanah	2.5	3.4	0.1	2.3
Kacang Hijau	2.0	2.7	0.2	2.5
Kacang Iain	1.3	1.8	0.1	1.4
Subtotal	73.4	100.0	6.2	100.0
7. Gula				
Gula Pasir	33.0	77.5	0.1	50.0
Gula Merah	9.5	22.5	0.1	50.0
Subtotal	42.5	100.0	0.2	100.0
8. Sayur dan Buah				
Sayur	62.1	55.6	3.0	78.1
Buah	49.6	44.4	0.8	21.9
Subtotal	111.7	100.0	3.8	100.0
9. Lain-lain				
Minuman	56.5	95.4	1.1	93.0
Bumbu	2.7	4.6	0.1	7.0
Subtotal	59.2	100.0	1.2	100.0

Lampiran 3. Gap Konsumsi Pangan Penduduk di Kota Bogor Menurut Kelompok dan Jenis Pangan Tahun 2023

Kelompok dan Jenis Pangan	Konsumsi Per Kapita		Estimasi Ideal Per Kapita		Gap Konsumsi Per Kapita		
	Gram/Hari	Kg/Tahun	Gram/Hari	Kg/Tahun	Gram/Hari	Kg/Tahun	%
1. Padi-Padian							
Beras	241.8	88.3	217.3	79.3	24.5	8.9	11.3
Jagung	1.9	0.7	1.7	0.6	0.2	0.1	11.3
Terigu	57.3	20.9	51.5	18.8	5.8	2.1	11.3
Subtotal	300.9	109.8	270.4	98.7	30.5	11.1	11.3
2. Umbi-umbian							
Singkong	21.9	8.0	63.0	23.0	(41.1)	(15.0)	(65.2)
Ubi Jalar	6.2	2.3	17.9	6.5	(11.7)	(4.3)	(65.2)
Sagu	9.2	3.3	26.3	9.6	(17.2)	(6.3)	(65.2)
Kentang	1.0	0.4	2.9	1.0	(1.9)	(0.7)	(65.2)
Umbi Lainnya	0.4	0.1	1.0	0.4	(0.7)	(0.2)	(65.2)
Subtotal	38.7	14.1	111.2	40.6	(72.5)	(26.4)	(65.2)
3. Pangan Hewani							
Daging Ruminansia	11.5	4.2	9.8	3.6	1.6	0.6	16.6
Daging Unggas	31.9	11.6	27.3	10.0	4.5	1.7	16.6
Telur	25.8	9.4	22.1	8.1	3.7	1.3	16.6
Susu	10.6	3.9	9.1	3.3	1.5	0.6	16.6
Ikan	42.8	15.6	36.7	13.4	6.1	2.2	16.6
Subtotal	122.6	44.7	105.1	38.4	17.5	6.4	16.6
4. Minyak dan Lemak							
Minyak Kelapa	1.5	0.5	1.2	0.4	0.3	0.1	28.4
Minyak Lainnya	27.1	9.9	21.1	7.7	6.0	2.2	28.4
Margarin	1.5	0.5	1.2	0.4	0.3	0.1	28.4
Subtotal	30.1	11.0	23.4	8.5	6.7	2.4	28.4
5. Buah/Biji Berminyak							
Kelapa	0.7	0.3	8.1	3.0	(7.4)	(2.7)	(91.1)
Kemiri	0.3	0.1	3.1	1.1	(2.8)	(1.0)	(91.1)
Subtotal	1.0	0.4	11.2	4.1	(10.2)	(3.7)	(91.1)
6. Kacang-kacangan							
Kacang Kedelai	28.8	10.5	41.1	15.0	(12.4)	(4.5)	(30.1)
Kacang Tanah	0.6	0.2	0.8	0.3	(0.2)	(0.1)	(30.1)
Kacang Hijau	1.1	0.4	1.6	0.6	(0.5)	(0.2)	(30.1)
Kacang lain	0.4	0.2	0.6	0.2	(0.2)	(0.1)	(30.1)
Subtotal	30.9	11.3	44.1	16.1	(13.3)	(4.8)	(30.1)
7. Gula							
Gula Pasir	8.3	3.0	20.5	7.5	(12.2)	(4.4)	(59.5)
Gula Merah	2.5	0.9	6.3	2.3	(3.7)	(1.4)	(59.5)
Subtotal	10.8	3.9	26.7	9.8	(15.9)	(5.8)	(59.5)
8. Sayur dan Buah							
Sayur	128.7	47.0	145.1	53.0	(16.5)	(6.0)	(11.4)
Buah	76.5	27.9	86.3	31.5	(9.8)	(3.6)	(11.4)
Subtotal	205.1	74.9	231.4	84.5	(26.3)	(9.6)	(11.4)
9. Lain-lain							
Minuman	69.7	25.4	74.2	27.1	(4.5)	(1.6)	(6.1)
Bumbu	7.2	2.6	7.7	2.8	(0.5)	(0.2)	(6.1)
Subtotal	76.9	28.1	81.9	29.9	(5.0)	(1.8)	(6.1)

Lampiran 4. Estimasi Kebutuhan Konsumsi Pangan Penduduk Kota Bogor Menurut Kelompok dan Jenis Pangan Tahun 2023

Kelompok dan Jenis Pangan	Kebutuhan Per Tahun		Estimasi Ideal Per Tahun		Gap Kebutuhan Konsumsi		
	Kg/Kapita	Ribu Ton	Kg/Tahun	Ribu Ton	Kg/Kapita	Ribu Ton	%
1. Padi-Padian							
Beras	97.1	103.9	87.2	485.6	9.8	(381.7)	11.3
Jagung	0.7	0.8	0.7	3.7	0.1	(2.9)	11.3
Terigu	23.0	24.6	20.7	115.0	2.3	(90.4)	11.3
Subtotal	120.8	129.4	108.6	604.4	12.2	(475.0)	11.3
2. Umbi-umbian							
Singkong	8.8	9.4	25.3	140.8	(16.5)	(131.4)	(65.2)
Ubi Jalar	2.5	2.7	7.2	40.0	(4.7)	(37.3)	(65.2)
Sagu	3.7	3.9	10.6	58.9	(6.9)	(54.9)	(65.2)
Kentang	0.4	0.4	1.2	6.4	(0.8)	(6.0)	(65.2)
Umbi Lainnya	0.1	0.2	0.4	2.3	(0.3)	(2.2)	(65.2)
Subtotal	15.5	16.6	44.6	248.5	(29.1)	(231.9)	(65.2)
3. Pangan Hewani							
Daging Ruminansia	4.6	4.9	3.9	22.0	0.7	(17.0)	16.6
Daging Unggas	12.8	13.7	11.0	61.1	1.8	(47.4)	16.6
Telur	10.4	11.1	8.9	49.4	1.5	(38.3)	16.6
Susu	4.3	4.6	3.7	20.4	0.6	(15.8)	16.6
Ikan	17.2	18.4	14.7	82.0	2.4	(63.6)	16.6
Subtotal	49.2	52.7	42.2	235.0	7.0	(182.3)	16.6
4. Minyak dan Lemak							
Minyak Kelapa	0.6	0.6	0.5	2.6	0.1	(1.9)	28.4
Minyak Lainnya	10.9	11.7	8.5	47.2	2.4	(35.5)	28.4
Margarin	0.6	0.6	0.5	2.6	0.1	(1.9)	28.4
Subtotal	12.1	12.9	9.4	52.3	2.7	(39.4)	28.4
5. Buah/Biji Berminyak							
Kelapa	0.3	0.3	3.2	18.1	(3.0)	(17.8)	(91.1)
Kemiri	0.1	0.1	1.3	7.0	(1.1)	(6.8)	(91.1)
Subtotal	0.4	0.4	4.5	25.0	(4.1)	(24.6)	(91.1)
6. Kacang-kacangan							
Kacang Kedelai	11.6	12.4	16.5	92.0	(5.0)	(79.6)	(30.1)
Kacang Tanah	0.2	0.2	0.3	1.8	(0.1)	(1.5)	(30.1)
Kacang Hijau	0.4	0.5	0.6	3.5	(0.2)	(3.0)	(30.1)
Kacang lain	0.2	0.2	0.3	1.4	(0.1)	(1.2)	(30.1)
Subtotal	12.4	13.3	17.7	98.6	(5.3)	(85.4)	(30.1)
7. Gula							
Gula Pasir	3.3	3.6	8.2	45.7	(4.9)	(42.2)	(59.5)
Gula Merah	1.0	1.1	2.5	14.0	(1.5)	(12.9)	(59.5)
Subtotal	4.3	4.6	10.7	59.7	(6.4)	(55.1)	(59.5)
8. Sayur dan Buah							
Sayur	51.7	55.3	58.3	324.4	(6.6)	(269.1)	(11.4)
Buah	30.7	32.9	34.6	192.8	(3.9)	(159.9)	(11.4)
Subtotal	82.4	88.2	92.9	517.2	(10.5)	(429.0)	(11.4)
9. Lain-lain							
Minuman	28.0	30.0	29.8	165.8	(1.8)	(135.9)	(6.1)
Bumbu	2.9	3.1	3.1	17.2	(0.2)	(14.1)	(6.1)
Subtotal	30.9	33.1	32.9	183.1	(2.0)	(150.0)	(6.1)